



LAPORAN DELEGASI DPR RI UN PARLIAMENTARY HEARING “SCALING UP ACTION FOR THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS: FINANCE, INSTITUTIONS, AND POLITICS

13-14 Februari 2025 New York - Amerika Serikat





LAPORAN DELEGASI DPR RI UN PARLIAMENTARY HEARING

13-14 Februari 2025
New York - Amerika Serikat



**LAPORAN PARTISIPASI DELEGASI BKSAP DPR RI PADA
IPU UN PARLIAMENTARY HEARING
13-14 FEBRUARI 2025**

***“Scaling up action for the Sustainable Development Goals: Finance, Institutions,
and Politics”***

**UN Trusteeship Council Room, UN Headquarter, New York, United States of
America**

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Forum *Parliamentary Hearing at the United Nations* merupakan Forum Pertemuan Parlemen Tahunan di PBB, New York dalam bentuk Dengar Pendapat dan audiensi dengan mengusung tema: Meningkatkan aksi untuk tujuan Pembangunan Berkelanjutan: Keuangan, Institusi, dan Politik.

Forum Parliamentary Hearing akan membahas secara mendalam cara-cara untuk memulai kembali Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan dan SDGs yang terkandung di dalamnya sebagai rencana global yang paling penting untuk memerangi kemiskinan, mengurangi ketidaksetaraan, dan mengatur ulang ke arah yang berkelanjutan. Secara khusus, kita akan melihat cara-cara dalam memobilisasi kemauan politik dan mencapai konsensus tentang kebijakan utama, memperkuat lembaga-lembaga untuk secara efektif melibatkan semua aktor, dimulai dari parlemen, dan memobilisasi pembiayaan penting dari sumber publik.

Selanjutnya, setelah adopsi Pakta untuk masa depan beserta lampirannya pada Sidang PBB bulan September 2025 mendatang, pada sidang gabungan PBB-IPU akan berusaha untuk memajukan komitmen terhadap percepatan SDGs.

Diskusi ini juga akan memberikan kesempatan untuk melakukan refleksi di antara para anggota parlemen tentang cara-cara untuk menutup kesenjangan pembiayaan untuk SDGs mengingat Konferensi PBB ke-4 tentang Pembiayaan untuk Pembangunan, di Spanyol, pada bulan Juni 2025.

Dalam Forum tahun ini terdapat 7 sub tema sidang yakni: tantangan besar SDGs: Memobilisasi kemauan politik; Pengawasan Parlemen terhadap SDGs; Kerja Sama Pembangunan dan SDGs; Menggalang Sumber Daya Domestik untuk SDGs; Krisis utang dan SDGs: Proposal untuk yang berkelanjutan; Perdagangan internasional untuk SDGs: Tantangan pengentasan kemiskinan melalui peningkatan ekspor, dan; Investasi sektor swasta untuk SDGs: Peran investasi jangka panjang swasta dan Keuangan Internasional.

B. Dasar Pengiriman Delegasi

Pengiriman Delegasi BKSAP DPR RI ke Forum *Parliamentary Hearing at the United Nations* berdasarkan Surat Tugas Nomor 04/KU.05.01/ST/KSOI/1/2025 tanggal 20 Januari 2025.

C. Susunan Delegasi

Susunan Delegasi BKSAP DPR RI, yang menghadiri Forum *Parliamentary Hearing at the United Nations* di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat, 13-14 Februari 2025 terdiri dari:

No.	Nama	Fraksi	Jabatan
1.	Mardani Ali Sera	F. PKS	Ketua BKSAP / Ketua Delegasi
2.	Ravindra Airlangga	F. Golkar	Wakil Ketua BKSAP / Anggota Delegasi
3.	Rachmat Gobel	F. Nasdem	Anggota BKSAP / Anggota Delegasi
4.	Elpisina	F. PKB	Anggota BKSAP / Anggota Delegasi

Selama mengikuti persidangan, Delegasi BKSAP didampingi oleh Pejabat dari PTRI New York, satu orang sekretaris dari Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI, dan satu orang Tenaga Ahli BKSAP DPR RI.

D. Maksud dan Tujuan Pengiriman Delegasi

Maksud dan tujuan pengiriman delegasi BKSAP DPR RI menghadiri Forum *Parliamentary Hearing at the United Nations*, adalah sebagai berikut:

1. Menunjukkan aspirasi dan komitmen Indonesia dalam memperjuangkan tercapainya ujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di 2030,
2. Mengadvokasi dan mendorong parlemen dunia untuk meningkatkan aksi dalam mencapai TPB, terutama di sektor keuangan, institusi dan politik.
3. Partisipasi Delegasi BKSAP DPR RI pada Forum *Parliamentary Hearing at the United Nations* dapat memberikan kesempatan untuk bertukar gagasan, pengalaman, dengan delegasi dari berbagai negara terkait dengan strategi-strategi efektif dalam nencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di 2030.
4. Penguatan diplomasi parlemen di mana DPR RI berperan sebagai jembatan antara kebijakan nasional dan forum internasional untuk mendukung agenda Indonesia di bidang keuangan, institusi dan politik.

E. Misi Delegasi

Misi Delegasi DPR-RI dalam Forum *Parliamentary Hearing at the United Nations* adalah:

1. Memperkuat peran diplomasi DPR RI dalam forum parlemen global.
2. Sebagai wujud peran aktif DPR RI terkait keanggotaannya di IPU dan PBB untuk membahas tema dan isu-isu yang menjadi agenda pembicaraan pertemuan khususnya.
3. Membangun kemitraan dan kerja sama di antara negara-negara anggota PBB dan IPU dalam kesetaraan gender.
4. Mengidentifikasi strategi dan prioritas global dan berkomitmen pada kebijakan dan rencana aksi untuk mencapai tujuan Pembangunan berkelanjutan.
5. Fokus pada pencapaian kesetaraan dalam pengambilan keputusan.

F. Persiapan Pengiriman Delegasi

Serangkaian persiapan telah dilakukan dalam menghadiri Forum *Parliamentary Hearing at the United Nations* ini. Setelah Pimpinan DPR RI memberikan persetujuannya untuk mengirim delegasi, dilanjutkan dengan mengadakan rapat Delegasi. Bahan-bahan masukan dan poin intervensi dibuat oleh Tenaga Ahli BKSAP DPR RI dengan mendapatkan masukan dari Kementerian Luar Negeri.

II. Laporan

A. Agenda

Agenda Parliamentary Hearing at the United Nations sebagai berikut:

NO	WAKTU	KEGIATAN	TEMPAT
Kamis, 13 Februari 2025			
1.	Pagi	Registrasi Delegasi	UN Headquarter 405 E 45th St, New York, 10017, USA
2.	10.00- 10.15	Welcome remarks H.E. Mr. Philemon Yang, President of the United Nations General Assembly; Hon. Dr. Tulia Ackson, President of the Inter-Parliamentary Union	Trusteeship Council Chamber, UN Secretariat Building
3.	10.45- 11.45	The deep challenge of the SDGs: Mobilizing political will	Trusteeship Council Chamber
4.	11.45- 13.00	Parliamentary oversight of the SDGs: The unfinished business of institutionalization	Trusteeship Council Chamber
5.	13.00- 15.00	Lunch Break	-
6.	15.00- 16.30	Development cooperation and the SDGs: Making the most of aid	Trusteeship Council Chamber
7.	16.30- 18.00	Raising domestic resources for the SDGs: A case for tax reforms	Trusteeship Council Chamber
Jum'at, 14 Februari 2025			
8.	10.00- 11.30	The debt crisis and the SDGs: Proposals for sustainable solutions	Trusteeship Council Chamber
9.	11.30- 13.00	International trade for the SDGs: The challenge of poverty eradication through export led growth	Trusteeship Council Chamber

NO	WAKTU	KEGIATAN	TEMPAT
10.	13.00-15.00	Lunch Break	-
11.	15.00-16.45	Private investments for the SDGs: The role of private long-term investments and of international finance	Trusteeship Council Chamber
12.	16.45-17.00	Closing Dr. Tulia Ackson, President of the Inter-Parliamentary Union	Trusteeship Council Chamber
13.	17.00	Bilateral Meeting dengan Parlemen Republic of Korea	The Indonesian Lounges

B. Sesi Pembukaan



Presiden Majelis Umum PBB Philémon Yang membuka sidang Parliamentary Hearing at the United Nations.
Dok: BKSAP

Presiden Majelis Umum PBB ke-79, Yang Mulia Philémon Yang, menyambut baik acara dengan pendapat parlemen yang dihelat di ruang Dewan Perwalian tersebut. Tema dialog adalah tepat seiring dengan rencana penyelenggaraan the 4th International Conference on Financing for Development (FfD4) yang akan digelar pada pertengahan tahun 2025.

Konferensi tersebut akan membahas mengenai upaya untuk menggali sumber daya dalam pencapaian pembangunan. Parlemen, menurutnya, memiliki peran penting dalam upaya peningkatan sumber daya sekaligus menggali mekanisme-mekanisme pendanaan inovatif untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).



Presiden IPU Tulia Ackson menyampaikan sambutan saat pembukaan sidang Parliamentary Hearing at the United Nations. Dok: BKSAP

Presiden IPU, Yang Mulia Tulia Ackson, mengungkapkan dengan pendapat ini merupakan respon dari ragamnya dokumen internasional yang menyebut peran parlemen dalam satu dekade ke belakang. Oleh karenanya, dalam konteks pencapaian TPB, parlemen memiliki peran penting. IPU sebagai organisasi global parlemen, mengembangkan berbagai perangkat pengetahuan untuk membantu parlemen memperkuat kapasitas khususnya dalam TPB seperti *SDGs Informed Legislative Scrutiny* (2025) atau *IPU SDGs Self Assessment Toolkit* (2016).

Kendati signifikansi peran parlemen bagi komunitas internasional semakin diakui, hasil di lapangan terkait pencapaian SDGs masih belum sesuai harapan. Ia menyarankan beberapa hal yang dapat dilakukan parlemen di level nasional dalam konteks TPB, yakni:

1. *Mewujudkan dukungan politik untuk menjawab mengapa TPB kurang menarik perhatian di level nasional;*

2. *Berkolaborasi dengan pemerintah dalam mekanisme pelaporan pencapaian TPB;*
3. *Memperkuat pengawasan parlemen dalam TPB;*
4. *Mengatasi tantangan kesenjangan pembiayaan TPB, termasuk dengan memperkuat peran parlemen.*

Dan Dunsky, jurnalis kawakan Kanada menjadi moderator Dengar Pendapat Parlemen tersebut. Ia menguraikan konsep diskusi yang akan mendalami upaya penguatan kelembagaan politik TPB di level nasional dan mendengar perspektif parlemen terkait isu pembiayaan pembangunan seiring dengan rencana penyelenggaraan the 4th International Conference on Financing for Development.

C. Sesi 1 – *The deep challenge of the SDGs: mobilizing political will*

1. Mr. Guy Ryder, Under-Secretary-General for Policy, United Nations

Sebagai perwakilan PBB, Mr. Guy Ryder, menyampaikan berdasarkan laporan PBB (*SDGs Report 2024*), status pencapaian TPB sebagai berikut:

- TPB memiliki 17 tujuan dan 169 target dengan 135 target diantaranya dapat diukur.
- Sedikitnya ada 17% target TPB (yang dapat diukur) telah mencapai target sebelum 2030.
- 18% target berproses menengah untuk menuju target 2030.
- 30% target memerlukan upaya keras.
- 18% target lainnya dalam stagnasi dan sisanya (17%) menunjukkan regresi (kemunduran).

Ia mengungkapkan pandangan TPB tidak gagal dalam agenda pembangunan. Ide dasar semestinya berawal dari bagaimana perkembangan pembangunan bila dunia tidak menyepakati adanya TPB.

Ia juga menekankan aspek multilateralisme sebagai wujud keberhasilan adanya agenda pembangunan tersebut. Tantangan global harus diselesaikan lewat multilateralisme.

Terkait dukungan politik, ia menegaskan adanya dukungan tersebut. Tetapi saat ini, dunia berada di persimpangan jalan ketika banyaknya pihak memperkuat kepentingan nasional mereka sebagai prioritas. Guy Ryder mengusulkan perlunya rekayasa kebijakan dan penguatan *know-how* dan komunitas internasional memiliki kemampuan untuk itu.

2. Ms. Nelly Mutti, Speaker of the National Assembly, Zambia

Yang Mulia Ms. Nelly Mutti menguraikan tantangan terkait dukungan politik untuk TPB yakni adanya kepentingan nasional yang menguat sebagai upaya menjaga keseimbangan janji elektoral. Pencapaian TPB tergantung pada prioritas pemimpin sementara prioritas pembangunan tergantung pada kelangsungan masa politik dari pemimpin pemerintahan.

Di sisi lain, pengaruh dari *the power group* yang kuat dan enggan mendorong kebijakan sejalan dengan TPB juga menjadi tantangan. Kelompok kekuasaan/kepentingan kadang melihat reformasi sebagai ancaman keberlangsungan mereka. Di sisi lain, politisi, parlemen, pembuat kebijakan hingga masyarakat memiliki sedikit pemahaman mengenai TPB.



Panelis di Sesi I Nelly Mutti Speaker of National Assemblies Zambia dan Prof. Jeffrey Sachs President Sustainable Development Solution Network. Dok: BKSAP

3. Prof. Jeffrey Sachs, President, Sustainable Development Solutions Network

Prof Jeffrey Sachs, memberikan pemahaman perspektif berbeda mengapa TPB perlu menjadi agenda pembangunan. Ia mendorong negara melihatnya sebagai bagian agenda ekonomi, mengingat TPB adalah agenda investasi, khususnya pada sumber daya manusia (kesehatan, pendidikan, sarana air bersih, infrastruktur, dan lainnya). Hasil dari itu adalah bisnis dapat

beroperasi lebih baik, kekayaan dan investasi nasional dapat meningkat. Ia menyarankan negara-negara untuk fokus pada anak-anak dan anak muda agar mereka mendapatkan hak lengkap seperti sekolah, infrastruktur pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya.

Berbicara terkait utang, ia mengkritisi rating utang seperti IMF World Bank Debt Credit Sustainability Framework yang kurang tepat. Ia juga menggagas alternatif pembiayaan global, termasuk untuk pendanaan PBB bila Amerika Serikat menarik diri dari pembiayaan. Dunia internasional perlu untuk menarik perpajakan internasional dari penerbangan, pengapalan dan lainnya berskala global. Pajak global diperlukan untuk membiayai barang publik global (*global public goods*). Prof Jeffrey Sachs mendesak adanya keadilan mendasar pada arsitektur keuangan global.

Terkait peran parlemen, ia menyarankan parlemen untuk memastikan eksekutif menjalankan kebijakan semaksimal mungkin untuk mewujudkan pencapaian hak pendidikan, kesehatan hingga infrastruktur. Ia berpesan agar parlemen untuk tidak membiarkan negara-negara kaya dan bank multilateral mendikte arah pembangunan negara.

D. Sesi II - *Parliamentary oversight of the SDGs: the unfinished business of institutionalization*

1. Mr. Adama Bictogo, Speaker of the National Assembly, Cote d'Ivoire

Yang Mulia Mr. Adama Bictogo merespon tema diskusi dengan menekankan berbagai krisis seperti inflasi keuangan, energi dan lainnya mengekang kemampuan nasional mencapai TPB. Oleh karenanya, ia menekankan sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam mencapai TPB.

Salah satu area yang ia ajukan agar parlemen dapat memperkuat perannya adalah di dalam pengawasan dana bantuan asing yang ditujukan untuk proyek-proyek TPB ataupun yang dapat memperkuat keahlian masyarakat. Apabila pengawasan dalam proyek-proyek tersebut diperkuat, maka, dampak dari pendanaan untuk proyek dimaksud akan terasa.

2. H.E. Mr. Ulugbek Lapasov, Permanent Representative of Uzbekistan to the United Nations

Yang Mulia Mr. Ulugbek Lapasov mencatat dan mengakui eksistensi keterlibatan parlemen di level dan agenda global yang semakin meningkat. Ia kemudian mengurai peran parlemen Uzbekistan dalam monitoring TPB seperti adanya Panitia Khusus (Pansus) TPB yang diketuai oleh Senat (*Oliy*

Majlis Senati). Di level internasional, Uzbekistan juga mendorong peningkatan peran parlemen dengan menginisiasi resolusi Majelis Umum PBB tentang *Enhancing the role of parliaments in accelerating the achievement of the SDGs (A/RES/77/159)*, resolusi kali pertama di PBB tentang peran parlemen dan SDGs.

3. Ms. Marina Ponti, Global Director, UN SDG Global Campaign

Ms. Marina Ponti, menerjemahkan TPB sebagai alat politik yang efektif untuk membangun kepercayaan publik. Di level global, PBB saat ini fokus pada pencapaian TPB terkait isu keadilan ekonomi dalam utang, ketidaksetaraan gender, dan aksi iklim. Oleh karenanya pencapaian di area tersebut akan menjadi obyek evaluasi.

Ia mendorong sebagai mekanisme politik, pihak-pihak berkepentingan perlu membangun komunikasi yang efektif agar dapat memiliki koalisi dalam mencapai TPB baik di level global maupun nasional. Salah satu mekanismenya adalah dengan melibatkan media dan masyarakat sipil.



Panelis di Sesi II Adama Bictogo, Speaker of the National Assembly, Cote d'Ivoire, Ulugbek Lapasov, Permanent Representative of Uzbekistan to the United Nations dan Marina Ponti, Global Director, UN SDG Global Campaign. Dok: BKSAP



Ketua BKSAP DPR RI Dr. Mardani Ali Sera menyampaikan pandangan pada sesi II dengan tema Parliamentary oversight of the SDGs: the unfinished business of institutionalization . Dok: BKSAP

Ketua Delegasi DPR RI, Dr. Mardani Ali Sera (F-PKS), pada kesempatan tersebut menyerukan penguatan kolaborasi global antara parlemen, pemerintah, dan masyarakat sipil dalam pencapaian TPB. Indonesia selama ini merupakan negara terdepan dalam pelibatan pencapaian TPB sejak awal. Dalam penyusunan TPB, Indonesia menjadi bagian penting sebagai anggota Tim Sekjen PBB yakni High Level Panel of Eminent Persons untuk agenda pasca-2015.

Pada 2017, Perpres TPB yang menjadi dasar legal pelaksanaan agenda global tersebut disahkan, menunjukkan tingginya komitmen negara dalam melaksanakan SDGs. Secara konsisten Indonesia juga melaporkan pencapaian perkembangan SDGs ke PBB melalui pelaporan nasional sukarela.

Namun demikian, upaya pencapaian SDGs di level nasional memerlukan mekanisme pengawasan yang memadai. Oleh karenanya kolaborasi

pengawasan antara parlemen dengan masyarakat sipil diperlukan untuk memastikan TPB yang sudah diadopsi sebagai program pembangunan nasional berjalan sesuai rel-nya. DPR telah membentuk Panja SDGs untuk memantau pencapaian tujuan tersebut. Ada pula [Portal Monitoring SDGs](#) yang menyajikan data pencapaian di level provinsi.

Saat ini Indonesia berada di ranking 78 dari 193 negara dalam pencapaian SDGs secara global. Tetapi upaya melindungi lingkungan hingga memperbaiki kualitas hidup manusia melalui pengentasan kemiskinan, pendidikan berkualitas, hingga lapangan pekerjaan yang semuanya menjadi bagian SDGs perlu diawasi agar semakin cepat tercapai. Ia menggarisbawahi urgensi pentingnya kolaborasi pengawasan bersama masyarakat sipil. Masyarakat sipil memiliki jaringan dan kekuatan akar rumput dalam pengawasan program-program terkait SDGs. Sementara Parlemen memiliki suara politik dalam mengoreksi aksi pemerintah yang tidak sesuai dengan ekspektasi.

E. Sesi III - *Development cooperation and the SDGs: making the most of aid*

1. H.E. Ambassador Lok Bahadur Thapa, Permanent Representative of Nepal to the United Nations

Yang Mulia Lok Bahadur Thapa menguraikan bagaimana bantuan pembangunan resmi (*Official Development Assistance/ODA*) atau bantuan dari negara donor dapat meningkatkan atau mereformasi sistem pemerintahan sehingga dapat meningkatkan pendapatan negara. Oleh karenanya, agar ODA efektif, parlemen harus proaktif melakukan peran pengawasan baik dalam konteks ODA maupun dalam pelaksanaan kebijakannya.

Parlemen, khususnya di negara penerima, harus memiliki peran menerima atau menolak bantuan asing, sebagai pemegang mandat publik dan pengawas jalannya pemerintahan. Di negara donor, parlemen berperan untuk mengkaji dengan teliti dan menyetujui rencana pemberian bantuan ke negara lain.

2. Ms. Susan Brown, Assistant Secretary General and Director, Bureau for External Engagement and Advocacy, UNDP

Ms. Susan Brown memberikan contoh langkah-langkah praktis mengenai bagaimana parlemen dapat berperan dalam pengawasan bantuan asing. Ia mendorong parlemen untuk secara detail melihat kontrak hibah atau bantuan

asing ataupun pinjaman asing sebagai upaya melihat masuk akal tidak segala syarat dan ketentuan dari pemberian dana asing dimaksud.

Mekanisme lainnya adalah pengawasan bersama dalam pelaksanaan proyek yang menggunakan dana asing tersebut. Pengalaman UNDP membuktikan parlemen yang turut serta mengawasi menghasilkan proyek dengan keluaran positif.



Para Panelis sesi II Lok Bahadur Thapa, Permanent Representative of Nepal to UN, Ms. Susan Brown, Assistant Secretary General and Director, Bureau for External Engagement and Advocacy UNDP, Susan Brown, Assistant Secretary General and Director, Bureau for External Engagement and Advocacy, UNDP. Dok: BKSAP

3. Ms. Nilima Gulrajani, Principal Research Fellow, Development and Public Finance Team, ODI Global

Ms. Nilima Gulrajani memaparkan realita mengenai legitimasi bantuan asing yang mendapatkan tantangannya dalam beberapa tahun ke belakang. Hal ini berkaitan dengan model penjajahan gaya baru atau neokolonialisme melalui bentuk bantuan asing. Selain itu persepsi publik terhadap bantuan asing ternyata tidak statis. Saat ini ia menilai tujuan pemberian dana bantuan asing tidak lagi jelas.

Bantuan asing pada akhirnya banyak mengabaikan kontrak sosial dengan masyarakat. Dengan demikian, ada potensi bantuan asing menjadi terdiskreditkan. Beberapa negara saat ini telah mereorientasi atau

mengubah pendekatan ODA mereka. Amerika Serikat bahkan saat ini tengah menghentikan pemberian dana bantuan asingnya secara total.

Ia mengatakan upaya untuk memperbaiki situasi dimaksud salah satunya dengan, bagi negara di Global North, memperkuat solidaritas ke negara-negara lainnya terutama negara berkembang dan tertinggal. Sementara di negara Global South perlu memiliki perspektif untuk tidak hanya mengandalkan dana bantuan asing dalam mencapai TPB. Parlemen idealnya memiliki komisi independen terkait ODA, mengingat bantuan asing kerap tak sejalan dengan prioritas negara penerima. Selain itu, ia mendorong pemangku kepentingan ODA negara donor untuk melokalisasi pelaksanaan bantuan asing. Artinya, penerima dan lebih jauh lagi, pelaku di level lokal mendapatkan kuasa, kepercayaan dan kontrol memadai dalam melaksanakan bantuan asing.



Anggota BKSAP DPR RI Rachmat Gobel menyampaikan intervensi pada sesi III dengan tema Development cooperation and the SDGs: making the most of aid. Dok: BKSAP

DELEGASI DPR RI, Rachmat Gobel (F Partai Nasdem), pada forum tersebut tersebut mendorong komunitas parlemen untuk memiliki standar global pengawasan dana bantuan asing. Rachmat mengungkap tantangan parlemen dalam pengawasan bantuan asing. Konstitusi Indonesia dan UU tentang Keuangan Negara memberi mandat seluruh perjanjian Internasional yang berdampak ke keuangan negara harus mendapat persetujuan DPR.

Kendati demikian, selama ini penjelasan pemerintah masih bersifat makro. Ia memberi contoh bantuan pertanian senilai Rp 1 triliun dari lembaga keuangan Internasional untuk Project Upland, yang didedikasikan untuk pengembangan kapasitas dalam pertanian terintegrasi di dataran tinggi. Bantuan pertanian penting bagi 17,2 juta petani kecil. Selain itu sektor kehutanan, pertanian, dan perikanan menyerap 40 juta lapangan pekerjaan pada 2022.

Namun, parlemen kesulitan mengukur dampak, dan pemerataan distribusi bantuan dimaksud sebagai akibat kurang detailnya informasi bantuan asing yang diterima DPR. Untuk itu, ia menyerukan agar komunitas parlemen global bekerjasama menghasilkan panduan internasional untuk menciptakan standar yang sama dalam mekanisme pengawasan bantuan asing.

F. Sesi IV - *Raising domestic resources for the SDGs: a case for tax reforms*

1. Mr. Navid Hanif, Assistant Secretary-General for Economic Development, UN Department of Economic and Social Affairs

Mr. Navid Hanif mengungkapkan kecenderungan skema perpajakan yang saat ini semakin menurun (regresif). Hal ini membuat negara bergantung pada skema pencarian pendapatan lainnya termasuk melalui perpajakan tidak langsung. Ketergantungan yang berlebihan pada skema perpajakan tidak langsung tidak akan bagus secara jangka panjang.

Untuk itu, ia menjelaskan adanya seruan untuk mewujudkan aturan main perpajakan internasional dalam cara yang berkeadilan. PBB memiliki [Komite Pakar untuk Kerja Sama Internasional untuk Urusan Perpajakan](#) yang membantu negara-negara mendesain kebijakan perpajakan. Saat ini rezim global untuk perpajakan internasional adalah 15% dari rasio PDB.

Negara yang memiliki sistem perpajakan yang kuat dapat mendorong peningkatan kepercayaan publik yang perlu diimbangi dengan meningkatnya transparansi pengelolaan pendapatan negara.

2. Mr. Ian Gary, Director Financial Accountability and Corporate Transparency (FACT), and Member of the Global Alliance for Tax Justice

Mr. Ian Gary memberi perspektif banyaknya korporasi global mengakali penghindaran pajak melalui mekanisme [Base Erosion Profit Shifting](#) (BASE). Di sisi lain, negara-negara barat juga kerap malah menjadi tuan rumah dari upaya penghindaran pajak. Oleh karenanya, transparansi perpajakan yang

lebih luas adalah penting, terutama untuk mendorong pelaporan korporasi tentang apa yang mereka lakukan dan tidak lakukan.

FACT dan Global Alliance for Tax Justice mendorong parlemen untuk mewujudkan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan. Oleh karenanya mereka merekomendasikan parlemen mengesahkan undang-undang yang memberi perlakuan pajak tinggi ke orang kaya, memperkuat transparansi pemilik manfaat utama (*beneficial ownership/BO*), mencari cara yang lebih sempurna untuk memperkuat skema perpajakan bagi perusahaan-perusahaan tambang, dan lainnya.

3. Ms. Marlene Nembhand Parker, Deputy Commissioner General, Legal Services Division, Tax Administration Jamaica

Ms. Marlene mengelaborasi peran otoritas perpajakan di Jamaika. Berdasarkan pengalamannya, parlemen memiliki peran kritikal dalam tahap penyusunan atau perubahan undang-undang perpajakan dan dalam mengelola pelaksanaan undang-undang tersebut.



Para panelis sesi IV Navid Hanif, Assistant Secretary-General for Economic Development, UN Department of Economic and Social Affairs, Ian Gary, Director FACT, and Member of the Global Alliance for Tax Justice dan Marlene Nembhand Parker, Deputy Commissioner General, Legal Services Division, Tax Administration Jamaica. Dok: BKSAP

DELEGASI DPR RI, Ravindra Airangga (F Partai Golkar), menekankan sistem perpajakan Internasional harus berkeadilan dan menyentuh skema-skema bisnis baru yang sebelumnya tak tersentuh seperti ekonomi digital. Sistem perpajakan Internasional juga perlu memastikan korporasi global dapat dipajaki di masing-masing negara tempat dia beroperasi.

Indonesia telah menerapkan global minimum tax (GMT) untuk korporasi multinational yang beroperasi di Indonesia sebesar 15% dengan dasar OECD/G20 Inclusive Framework. Di sisi lain, PBB telah menyepakati pembentukan komisi negosiasi antarpemerintah untuk penyusunan Konvensi Kerangka Kerja PBB untuk Kerja Sama Internasional Perpajakan. Ia berharap OECD/G20 Inclusive Framework dan rencana Konvensi Internasional Perpajakan dari PBB dapat bersifat saling melengkapi sekaligus dapat menjadi solusi perpajakan bagi ekonomi digital. Perpajakan penting untuk meningkatkan sumber daya domestik dalam mewujudkan pelayanan publik dari negara.



Wakil Ketua BKSAP DPR RI Ravindra Airangga saat menyampaikan intervensi pada sesi IV yang mengangkat tema Raising domestic resources for the SDGs: a case for tax reforms. Dok: BKSAP

G. Sesi 5 – *The debt crisis and the SDGs: Proposals for sustainable solutions*

Sesi ini membahas tantangan keberlanjutan bagi utang yang sejauh ini terlihat seperti tidak berkelanjutan mengingat negara kerap mengesampingkan urusan

layanan publik demi membayar utang. Sesi diawali dengan pembuka dari sejumlah panelis yakni:

1. **Mrs. Shari Spiegel, Director of the Financing for Sustainable Development Office UN DESA**

Shari Spiegel mengawali pembahasa dengan dua sorotan yakni mengenai hal meminjam dan mekanisme ketika negara dalam keadaan bangkrut (tidak bisa membayar utang). Hal meminjam bagi negara adalah lingkaran setan, semakin banyak pinjaman menyebabkan krisis bagi pembangunan berkelanjutan karena negara tidak bisa fokus pada pelayanan publik. Dalam hal negara bangkrut dan ataupun proses restrukturisasi, tantangan yang ditemui adalah tidak adanya pengadilan niaga yang mengurus skema kepailitan negara. Hal ini semakin sulit bila dikaitkan dengan status kreditor, mengingat tidak ada konteks kreditor paling awal atau akhir dan juga dalam konteks negara, institusi kreditor sangat bervariasi.

2. **Jason Rosario Braganza, Executive Director African Forum and Network on Debt and Development (AFRODAD)**

Jason Rosario mengelaborasi 5P sebagai hasil pengamatannya dalam krisis utang yang mempengaruhi negara berkembang khususnya Afrika. 5P tersebut adalah:

- *Power* (Kuasa): Ia melihat seringnya ada ketidaksetaraan antara pihak yang bernegosiasi. Asimetri kuasa dalam arsitektur utang yang condong ke kreditor ketimbang peminjam. Di beberapa negara berkembang, khususnya di Afrika, seperti Zambia, Ghana, Ethiopia, mengabaikan agenda pembangunannya demi melunasi utang (atau demi kepentingan kreditor) yang terus menerus.
- *Politics* (Politik): Ia melihat dalam konteks tersebut belum ada *political will* yang benar-benar ada untuk mengatasi semua hal dimaksud, khususnya agar krisis utang tidak memburuk. Selain itu, ada ideologi untuk membangun memerlukan utang. Ideologi tersebut, dengan tanpa mempertimbangkan bentuk lain pembiayaan pembangunan atau transformasi ekonomi akan berbahaya. Negara-negara perlu mempertanyakan kembali mengapa negara berkembang kembali terjerat utang, mengapa negara berkembang memiliki defisit fiskal, defisit perdagangan dan lainnya, meski sebagian di masa lalu level utang hampir nol melalui mekanisme HIPC ataupun MDRI (*Multilateral Debt Initiative*).

- *People* (Manusia): Selama ini ide utang dan pembiayaan utang tidak berpusat pada manusia, ataupun pembangunan pelayanan publik. Negara didor untuk fokus pada urusan utang, ketimbang pendidikan, air, layanan kesehatan dan lain sebagainya. Hal ini menggeser peran negara dari kontrak sosial mereka ke kontrak demi keuntungan kreditor (*from social contract to profit creditor contract*).
- *Production* (Produksi): Negara-negara hingga saat ini belum fokus pada upaya meningkatkan kapasitas produksi atau transformasi ekonomi. Utang kerap berkontribusi pada ketidakmampuan negara untuk membangun ketimbang mendorong pembangunan. Hal ini berakibat fatal seperti ketika COVID-19, negara-negara Afrika yang hanya mengekspor material mentah (*raw materials*) saja, menyebabkan produksi global macet karena tidak bisa ekspor. Dampaknya, negara-negara tersebut juga mengalami kemandegan ekonomi. Oleh karenanya, parlemen perlu memastikan penggunaan utang agar dapat menjadi katalis transformasi ekonomi. Selain itu, ia mendorong negara untuk melihat peran institusi multilateral karena tidak dapat berperan banyak dalam mendorong transformasi ekonomi negara-negara.
- *Private* (Swasta): Sektor swasta tidak dapat menjadi gantungan dalam urusan publik. Ketika berhadapan dengan urusan publik, negara tidak perlu dipaksa mengadopsi solusi berbasis pasar sektor swasta. Ia mendorong arsitektur global bergeser dari penerapan pertimbangan pasar ataupun fokus ke kreditor dalam hal layanan kesehatan, pendidikan, sarana air dan lainnya.

Pada kesempatan itu ia menyarankan tiga solusi yakni mendemokratisasi restrukturisasi utang demi mengatasi asimetri kuasa, memperkuat posisi kolektif di regional untuk menggarisbawahi bahanya krisis utang, dan di level nasional memperkuat peran parlemen dalam pengawasan utang, dalam mengawasi syarat ketentuan utang, hingga kerangka hukumnya.

3. Jil Dauchy, CEO Potomac Group

Sebagai bagian dari konsultan strategi keuangan independen ke pemerintah dan sektor publik yang berutang, Jil menyampaikan empat observasi yakni (i) investasi dibutuhkan untuk mencapai SDGs sangat besar; (ii) krisis utang bersifat global; (iii) cara untuk keluar dari krisis pembangunan adalah dengan kreatif dalam memanfaatkan sumber daya yang langka; (iv) parlemen penting untuk mewujudkan hal-hal tersebut.

Ia mengungkap fakta terkait situasi utang negara. Hampir separuh negara berpendapatan rendah (35 dari 68 negara) berada dalam risiko tinggi atau krisis utang. Sekitar 50% dari negara berpendapatan menengah memiliki risiko tinggi utang tetapi masih berkelanjutan dan 9% menuju arah utang tak berkelanjutan. Negara maju juga mengalami peningkatan utang. Amerika Serikat memiliki utang senilai US\$ 35 triliun atau 123% dari PDB mereka. Uni Eropa juga mengalami peningkatan utang, bahkan sebelum peningkatan anggaran pertahanan dan pembangunan kembali Ukraina. Ini menunjukkan tidak adanya ruang untuk merespon krisis dengan baik.



Para panelis sesi V Shari Spiegel, Director of the Financing for Sustainable Development Office UN DESA, Jason Rosario Braganza, Executive Director African Forum and Network on Debt and Development (AFRODAD), Jil Dauchy, CEO Potomac Group. Dok: BKSAP

Ia menyarankan perlunya perubahan dalam aspek pembiayaan pembangunan dengan lebih fleksibel, inovatif dan berorientasi pasar. Ada negara-negara yang berhasil keluar dari krisis seperti Argentina, Lebanon, Ekuador, El-Salvador, Sri Lanka yang mengetatkan obligasinya dan pasar merespon perubahan-perubahan tersebut.

Inovasi dalam pembiayaan meningkat dengan adanya surat utang/obligasi hijau, sosial, atau yang terkait dengan aspek berkelanjutan meningkat pada

kuartal ketiga 2024 mencapai US\$ 33,4 miliar, 35% lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Ia juga mengurai sejumlah negara terkini yang mengeluarkan inovasi dimaksud seperti Chile, Uruguay, Republik Dominika yang mengeluarkan US\$ 750 juta obligasi khusus untuk proyek perubahan iklim, Turkiye pada 2023 mengeluarkan obligasi hijau untuk 86 aktivitas di proyek hijau, Qatar yang meluncurkan US\$ 2,5 miliar obligasi hijau—pertama di Timur Tengah—untuk energi terbarukan, pembaruan infrastruktur dan real estate ramah lingkungan. Inovasi lain adalah terkait debt swap hingga penerapan klausul risiko (klausul tunda / *pause clause*) sebagai cara pengendalian utang.

Parlemen oleh karenanya, berperan penting dalam memastikan utang dan pembiayaan donor transparan dan sejalan dengan kebijakan nasional. Pengawasan yang kuat meningkatkan akuntabilitas dan memperkuat anggaran, memprioritaskan layanan publik ketimbang urusan utang. Pengawasan baik di donor dan penerima meningkatkan kepercayaan dan efisiensi.



Anggota BKSAP DPR RI Elpisina menyampaikan intervensi pada sesi V yang mengangkat tema The debt crisis and the SDGs: Proposals for sustainable solutions. Dok: BKSAP

DELEGASI DPR RI, diwakili Hon. Elpisina (FPKB) menyoroti strategi seperti apa yang bisa digunakan negara untuk mengelola utang lebih berkelanjutan mengingat negara-negara banyak yang mengalokasikan anggarannya untuk

pembayaran utang lebih banyak ketimbang layanan publik. Ia menggarisbawahi perlunya mekanisme restrukturisasi utang yang tidak hanya memperpanjang pembayaran utang atau mengorbankan layanan publik.

Ketiga panelis dalam penutup sesi menggarisbawahi pentingnya peran parlemen dalam urusan pengawasan utang, dan menyoroti tentang ketentuan-ketentuan dan persyaratan dalam perjanjian utang. Selain itu penguatan legislasi domestik terkait utang juga diperlukan. Anggota Parlemen juga didorong mendesak Kementerian Keuangan mempublikasi rencana utang dan mengkritisnya untuk membangun kepercayaan publik terkait kemampuan negara mengelola utang. Parlemen juga perlu melihat *zero draft* (rancangan awal) yang akan menjadi keputusan dari the 4th International Conference on Financing for Development (FfD4).

H. Sesi VI – *International trade for the SDGs: The challenge of poverty eradication through export led growth*

1. Mr. Thomas Schnoll, Permanent Observer OECD to UN

Thomas Schnoll mengungkapkan ada dua elemen bagi parlemen untuk dapat berkontribusi pada aspek perdagangan internasional. Yang pertama adalah dialog sebagai mekanisme menjembatani kepentingan. Berikutnya adalah transparansi khususnya dalam era mis dan dis-informasi. OECD memiliki kontribusi dalam hal ini khususnya dalam penyediaan data berbasis bukti (*evidence-based data*).

Dalam hal peluang dan tantangan bagi perdagangan untuk pembangunan. Selama 30 tahun terakhir, perdagangan internasional meningkat dan mendorong ekonomi negara berkembang bertumbuh. Dari 1995 ke 2023, secara keseluruhan meningkat dari 43% ke 59%. Peningkatan perdagangan adalah aspek penting membantu negara berkembang untuk naik status. Namun, banyak negara yang masih terperangkap pada komoditas ekspor bernilai rendah, menghambat pertumbuhan produktivitas.

Dalam skema rantai pasokan global, ada peluang bagi negara berkembang dalam perdagangan internasional untuk fokus pada perakitan, komponen, manufaktur, atau jasa. OECD memiliki inisiatif yang mengkaji dan mendesain strategi tertentu untuk peningkatan industrialisasi. Ada tiga elemen terkait, *Pertama*, penting berinvestasi untuk mengembangkan upaya pembelajaran. Rantai pasok global harus menjadi platform pertukaran pengetahuan. *Kedua*, menarik investor dengan tujuan memaksimalkan manfaat lokal. Kemitraan kuat antara investor asing dan perusahaan lokal sangat penting. *Ketiga*,

mengantisipasi dan beradaptasi pada tren yang membentuk lanskap perdagangan dan investasi internasional.

OECD Global Outlook memprediksi kesenjangan pembiayaan SDGs pada 2030 senilai US\$ 6,4 triliun jika tidak ada perubahan besar. Angka perdagangan global diperkirakan mencapai US\$ 25 triliun. Jika negara berkembang dapat terintegrasi dengan baik dalam rantai pasokan global, maka, sebagian kesenjangan pembiayaan SDGs dapat teratasi.

2. Mr. Juan Jose Martinez Badillo, Chief, UN Trade and Development, NY Office

Juan Jose Martinez Badillo menyampaikan UNCTAD dibentuk atas pandangan keterhubungan antara perdagangan dan pembangunan. Banyak negara berkembang mengandalkan perdagangan untuk menghasilkan pendanaan, baik sebagai sumber pertumbuhan ataupun penguatan mata uang (*hard currency*).

Ada kebutuhan untuk investasi dalam mengembangkan kapasitas perdagangan negara-negara berkembang. Elemen yang diperlukan adalah ruang fiskal. Di level internasional, hasil keputusan KTT PBB untuk Masa Depan yakni Pact for the Future juga menekankan beberapa aspek perdagangan internasional seperti non-diskriminasi dan lainnya.

Transformasi ekonomi memerlukan teknologi. Sayangnya, tata kelola hak atas kekayaan intelektual saat ini tidak membuka ruang teknologi ke arah yang diperlukan. Ia juga mengungkapkan aspek lainnya yakni terkait investasi. UNCTAD mendorong terbentuknya perjanjian investasi baru yang dapat mendorong negara-negara berkembang mewujudkan tujuan pembangunan mereka.

Parlemen memerlukan pemahaman komprehensif meliputi teknologi, pendanaan, hingga perdagangan sebagai bagian dari pengawasan kebijakan industrial. Parlemen idealnya adalah pemain politik utama yang harus bisa membawa semuanya ke arah yang sama.

3. Ms. Melinda St. Louis, Director, Public Citizen's Global Trade Watch

Melinda St Louis menerangkan organisasinya sebagai perwakilan organisasi konsumen yang bekerjasama dalam kemitraan Global South dan Global North untuk advokasi kebijakan perdagangan yang adil dan setara.

Ia menilai perdagangan bebas didominasi kepentingan perusahaan multinasional Global North, masyarakat sipil dipinggirkan, menciptakan defisit demokrasi yang besar. Ia mencontohkan, konstitusi AS memandatkan legislatif dalam urusan perdagangan dengan negara asing. Tetapi, mereka mendelegasikannya ke eksekutif. Di AS juga memiliki Trade Advisory System, yang merepresentasikan kelompok perusahaan multinasional dan kerap menyusun aturan perdagangan sendiri.

Imbas dari mekanisme tersebut adalah aturan perdagangan yang tidak memprioritaskan pembangunan berkelanjutan dan hak asasi manusia, tetapi, condong kepada yang disukai perusahaan multinasional. Ia mencontohkan, aturan investasi AS yang membuka ruang perusahaan menggugat pemerintah apabila pemerintah merugikan investasi perusahaan, adanya ketidakseimbangan kebijakan perdagangan secara semantik seperti di pertanian dengan subsidi yang dapat diterapkan oleh negara-negara Global North sementara negara berkembang tidak dapat menerapkan larangan ekspor atau hal lainnya. Langkah ini berakibat pada terkuncinya negara Global South untuk hanya melakukan ekspor material mentah ke negara maju tanpa kesempatan untuk menaikkan rantai nilainya.



Panelis sesi VI Thomas Schnoll, Permanent Observer OECD to UN, Juan Jose Martinez Badillo, Chief, UN Trade and Development, NY Office, serta Melinda St. Louis, Director, Public Citizen's Global Trade Watch. Dok: BKSAP

Upah pekerja Global North dimurahkan ke wilayah yang paling rendah, sementara di Global South dieksploitasi. Masyarakat sipil global mendorong transformasi sistem perdagangan global yang meminta akuntabilitas korporasi dan mendorong perlindungan HAM.

Parlemen berperan dalam mengawasi pemerintah, mendorong transparansi dalam proses pengambilan kebijakan perdagangan, mendesak prioritas domestik vital yang mengatur aktivitas korporasi domestik tidak dirusak oleh perjanjian perdagangan dan investasi.



Delegasi BKSAP DPR RI. Dok: BKSAP

DELEGASI DPR RI, diwakili Hon. Rahmat Gobel (F-Nasdem), menekankan perlunya sistem perdagangan internasional dievaluasi. Saat ini, kebijakan perdagangan malah menjadi alat tawar politik. Inkonsistensi dari negara-negara yang cenderung pilih-pilih kebijakan yang menguntungkan semakin tinggi. Parlemen perlu terlibat secara lebih kuat dalam negosiasi perdagangan bebas. Komunitas parlemen global perlu mengoreksinya dan oleh karenanya, DPR RI mendorong bersama-sama untuk mencari cara terbaik akan dapat bergerak bersama selain aktif terlibat dalam forum IPU Parliamentary Conference on the WTO semata.

I. Sesi VII – Private investments for the SDGs: the role of private long-term investments and of international finance

Pada sesi ketujuh, selain panelis yang menyampaikan pandangan mereka dalam isu investasi, **KETUA DELEGASI DPR RI**, Dr. Mardani Ali Sera (FPKS) juga mengambil peran dengan menyoroti tantangan bagi negara-negara dalam upayanya meningkatkan pendapatan negara melalui investasi.

Indonesia memiliki sejumlah inovasi investasi yang digunakan untuk membiayai proyek-proyek SDGs seperti peluncuran SDGs bond hingga ke level investor retail. Dari sisi jenis investasi, Indonesia juga telah meluncurkan Environment, Social and Governance (ESG) Framework agar investasi yang masuk lebih sejalan dengan semangat Pembangunan Berkelanjutan. SDGs bond diluncurkan pada 2021 dan Indonesia menjadi negara pertama di Asia untuk itu.



Suasana sesi VII yang mengangkat tema Private investments for the SDGs: the role of private long-term investments and of international finance. Dok: BKSAP

Namun demikian, investasi memiliki tantangan bila dikaitkan dengan skema perpajakan, mengingat pengambil kebijakan perlu menyeimbangkan kebijakan terhadap dua hal tersebut.

Tren investasi adalah dengan memberi insentif khususnya melalui insentif perpajakan. Di sisi lain, negara perlu meningkatkan pendapatan lewat perpajakan. Apalagi saat ini Indonesia telah menerapkan Global Minimum Tax senilai 15% untuk korporasi global.

J. PERTEMUAN-PERTEMUAN BILATERAL

Selain mengikuti rapat dengar pendapat, Delegasi DPR RI juga melakukan pertemuan bilateral dengan parlemen negara sahabat pada Jumat, 14 Februari 2025.

1. Qatar Shura Council

Delegasi DPR RI yang terdiri dari Ketua Delegasi, Dr. Mardani Ali Sera dan Anggota Delegasi, Ravindra Airlangga, Rachmat Gobel, dan Elpisina bertemu dengan Y.M. Wakil Ketua Parlemen Qatar, Dr. Hamda bint Hassan Al Sulaiti, di UN Indonesian Lounge, Jumat, 14 Februari 2025.

Pada pertemuan tersebut, kedua parlemen mengapresiasi hubungan bilateral Indonesia – Qatar yang semakin kokoh. Pada pertemuan tersebut, Delegasi DPR RI mengapresiasi pameran World Social Summit 2025 yang diadakan Qatar di Markas Besar PBB. 2nd World Social Summit akan diselenggarakan pada 4-6 November 2025 di Doha, Qatar.

Ketua Delegasi DPR RI, Dr. Mardani Ali Sera, mendorong agar Parlemen Qatar juga dapat mengelat agenda parlemen sebagai bagian dari World Social Summit dimaksud. Parlemen Qatar mengapresiasi usulan dimaksud. Ketua Delegasi juga menyampaikan BKSAP DPR RI telah membentuk Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR RI – Parlemen Qatar, sebagai bagian dari pembentukan kembali 102 GKSB.

Lebih lanjut, Ketua Delegasi DPR RI mengapresiasi kepemimpinan dan peran Qatar di sejumlah organisasi internasional termasuk Global Organization of Parliamentarians against Corruption (GOPAC). Ia menyambut baik Doha sebagai tuan rumah 11th Conference of the State Parties to UNCAC Desember mendatang dan berharap GOPAC dapat berperan aktif dalam agenda PBB dimaksud.

2. Iraqi Council of Representatives

Delegasi DPR RI yang terdiri dari Ketua Delegasi, Dr. Mardani Ali Sera dan Anggota Delegasi, Ravindra Airlangga, Rachmat Gobel, dan Elpisina juga

menerima Y.M. Wakil Ketua DPR Irak, Dr. Shakhawan Abdullah, di UN Indonesian Lounge, Jumat, 14 Februari 2025.

Kedua Delegasi berdiskusi mengenai upaya untuk mendukung kemerdekaan Palestina dan memperjuangkan aspirasi dan kepentingan kemerdekaan Palestina serta hak-hak asasi masyarakat Palestina di forum-forum internasional seperti IPU. Pada [150th IPU Assembly and related meetings](#) yang akan digelar di Tashkent, Uzbekistan, 5-9 April 2025, Komite Perdamaian dan Keamanan Internasional IPU, akan membahas penyusunan resolusi berkaitan dengan Palestina, yakni *The role of parliaments in advancing a two-State solution in Palestine*.

Kedua parlemen berharap dapat memperkuat dukungan untuk mengesahkan resolusi terkait, mengingat sejak 7 Oktober 2023 hingga saat ini, IPU belum dapat mengambil sikap melalui resolusi, bahkan melalui dua *emergency items* yang diajukan berturut-turut pada IPU ke-148 dan 149.

3. Republic of Korea National Assembly

Delegasi DPR RI yang terdiri dari Ketua Delegasi, Dr. Mardani Ali Sera dan Anggota Delegasi, Ravindra Airlangga, dan Elpisina menerima kehadiran Anggota Parlemen Korea Selatan Mrs. Lee Jae Jung dan Mr. Jiho Cha di UN Indonesian Lounge, Jumat, 14 Februari 2025.

Ketua Delegasi DPR RI, Dr. Mardani Ali Sera menyampaikan kebahagiaannya dapat bertemu dengan sahabat dari Korea Selatan. Parlemen Korea Selatan telah secara aktif bertemu dengan DPR RI dalam beberapa kesempatan di Jakarta. Ia menyampaikan kabar baik terkait pembentukan 102 GKSB di DPR RI, dan GKSB DPR RI – Parlemen Korea Selatan menjadi salah satu yang direaktivasi.

Anggota Delegasi, Ravindra Airlangga mengungkapkan apresiasi Korea Selatan yang telah menyerap banyak tenaga kerja Indonesia dan berharap kerja sama di sektor ketenagakerjaan dan pengiriman tenaga kerja ke Korea Selatan dapat berlanjut dalam skema yang konsisten melindungi dan menghormati hak-hak tenaga kerja migran termasuk tenaga kerja Indonesia di Korea Selatan.

Delegasi Parlemen Korea Selatan, Mrs. Lee Jae Jung, menyampaikan apresiasi atas kesan-kesan Delegasi DPR RI. Ia menyampaikan perkembangan terbaru mengenai situasi politik nasional terkait proses hukum dalam pemakzulan Presiden. Selain itu, ia mengharapkan agar perkembangan politik terbaru tersebut dapat disampaikan kepada Pimpinan

DPR RI. Ia juga memberikan secara langsung surat tertulis dari Pimpinan Parlemen Korea Selatan yang berisi perkembangan terkini situasi politik nasional di Korea Selatan dan kesediaan untuk bertemu dan berdiskusi secara virtual terkait hal tersebut.

III. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Agenda IPU – UN Parliamentary Hearing dan pertemuan-pertemuan bilateral berlangsung dengan lancar dan bermanfaat.
2. Isu sumber daya, dukungan politik, dan kelembagaan pengawasan pencapaian TPB menjadi bahasan mendalam dengan paparan-paparan panelis yang menekankan pada aspek keberadilan, keseimbangan peran Global North dan Global South, dan penguatan peran parlemen.
3. IPU – UN Parliamentary Hearing ini merupakan pertemuan persiapan untuk menjaring pandangan anggota IPU terkait pembahasan hasil keputusan the 4th International Conference on Financing for Development, yang akan digelar di Spanyol, Juni-Juli 2025 ini.
4. Parlemen ideal untuk terlibat dalam proses pengawasan pencapaian TPB termasuk dalam hal penyusunan Laporan Monitoring Sukarela (*Voluntary National Report*) TPB.
5. Parlemen memiliki peran signifikan dan perlu berperan mengawasi beragam perjanjian internasional terkait utang, dana bantuan asing, maupun aspek-aspek luar negeri lainnya yang berpengaruh bagi kepentingan publik dan keuangan negara serta memastikan transparansi penerimaan utang ataupun dana bantuan asing dimaksud.
6. Dukungan terhadap isu Palestina teruraikan melalui pertemuan bilateral dan dengan potensi pengesahan rancangan resolusi di Komite Perdamaian dan Keamanan Internasional IPU pada IPU Assembly ke-150, 5-9 April 2025, di Tashkent, Uzbekistan.

B. Saran

1. DPR RI untuk dapat menyampaikan hasil laporan ini kepada komisi terkait, khususnya Komisi XI dan Badan Anggaran.
2. DPR untuk dapat membangun pusat data informasi mengenai utang dan dana bantuan asing/hibah asing yang diterima Indonesia, lengkap dengan detail informasi terkait jenis perjanjian, hingga syarat dan ketentuannya, sebagai platform referensi informasi untuk memperkuat sistem pengawasan parlemen.
3. BKSAP DPR RI untuk dapat berkomunikasi dengan Kementerian Luar Negeri cq Perwakilan Tetap Republik Indonesia New York mengenai zero

draft dokumen the 4th International Conference on Financing for Development untuk dapat memperjuangkan penekanan penguatan peran parlemen dalam skema pengawasan keuangan, hibah asing, dan utang.

4. BKSAP DPR RI untuk konsisten berkomunikasi dengan Bappenas dalam proses penyusunan VNR TPB 2025.
5. BKSAP DPR RI untuk memberi perhatian khusus pada penyusunan resolusi *the role of parliaments in advancing a two-State solution in Palestine* yang akan dibahas dan disepakati pada IPU ke-150, 5-9 April 2025, di Tashkent, Uzbekistan.

IV. PENUTUP

A. Anggaran

Rangkaian kegiatan dan partisipasi Delegasi BKSAP DPR RI pada IPU United Nations Parliamentary Hearing 2025 yang berlangsung pada tanggal 11 Maret 2025 di Markas Besar PBB, New York–Amerika Serikat menggunakan mata anggaran MAK: 025.001030.CF.5805.AEC.001.C.524211 sebesar Rp929.603.050,- (Sembilan ratus dua puluh sembilan juta enam ratus tiga ribu lima puluh rupiah).

B. Keterangan dan Lampiran

Laporan delegasi DP RI menghadiri IPU United Nations Parliamentary Hearing 2025 dilengkapi dengan lampiran sebagai berikut:

1. Undangan dan Agenda kegiatan
2. Bahan, materi serta masukan dari Kementerian Luar Negeri RI
3. [Dokumentasi foto](#)
4. Publikasi Media
 - a. [Perlu Kolaborasi Capai SDGs](#)
 - b. [Perlu Standar Global Pengawasan Atas Bantuan Asing](#)
 - c. [Sistem Perpajakan Internasional Harus Sasar Skema Bisnis Baru](#)
 - d. [BKSAP Soroti Utang dan Belanja Layanan Publik](#)
 - e. [DPR Singgung Investasi dan Perpajakan](#)
 - f. [DPR Serukan Mekanisme Pengawasan Bantuan Internasional](#)
 - g. [Ravindra Airlangga: Perpajakan Global Harus Adil dan Sentuh Ekonomi Digital](#)

C. Ucapan Terimakasih

Delegasi DPR RI menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran tugas Delegasi sehingga misi delegasi pada IPU United Nations Parliamentary Hearing 2025 dapat terlaksanakan dengan baik.

Ucapan terima kasih disampaikan khususnya kepada Duta Besar Perutusan Tetap Republik Indonesia di New York, Amerika Serikat beserta

jajaran atas bantuan dan dukungan serta fasilitas yang diberikan kepada Delegasi DPR RI dan Sekretariat sehingga kegiatan dapat berjalan dengan lancar.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Sekretariat Jendral DPR RI, Biro Kerja Sama Antar Parlemen DPR RI, dan Tenaga Ahli atas dukungan teknis dan substansi sejak sebelum dan selama pertemuan berlangsung.

D. Kata Penutup

Semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai pustaka sejarah partisipasi DPR RI dalam kegiatan diplomasi parlemen melalui keikutsertaan dalam forum-forum antar parlemen. Laporan ini juga dapat menjadi rujukan bagi keikutsertaan DPR RI dalam forum-forum antar parlemen lainnya di masa mendatang.

Demikian Laporan Delegasi ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Delegasi DPR RI atas kegiatan yang telah dilaksanakan.

Jakarta, 19 Februari 2024

Ketua Delegasi

Dr. H. Mardani Ali Sera, M.Eng.



LAMPIRAN



Inter-Parliamentary Union
For democracy. For everyone.

Parliamentary Hearing at the United Nations

13 and 14 February 2025
New York



PRESIDENT OF THE GENERAL ASSEMBLY

Geneva/New York, 4 November 2024

Dear Madam President,
Dear Mr. President,

We are pleased to invite your parliament to participate in the 2025 Parliamentary Hearing at the United Nations which will take place in New York, on 13 and 14 February 2025 under the theme “**Scaling up action for the Sustainable Development Goals: Finance, Institutions, and Politics**”.

The hearing will take an in-depth look at ways to reboot the 2030 Agenda for Sustainable Development and the SDGs contained therein as the most important global plan to fight poverty, reduce inequality, and reset the planet on a sustainable course. In particular, we will look at ways to mobilize political will and achieve consensus on key policy prescriptions, strengthen institutions to effectively engage all actors, beginning with parliaments, and mobilize critical financing from both public and public sources.

Further to the adoption of the Pact for the Future and its annexes at the United Nations in September, the joint UN-IPU hearing will seek to advance commitments towards turbocharging the SDGs. The discussion will also provide an opportunity for a reflection among parliamentarians on ways to close the financing gap for the SDGs in view of the 4th UN Conference on Financing for Development, in Spain, in June 2025.

To participate in the Parliamentary Hearing, IPU Member Parliaments are requested to register their delegations using the [online form](#) for *each member* of the delegation. Delegations should be limited to six parliamentarians and must be accredited through their respective missions at the United Nations. A complete programme will be posted on the event's page on the [IPU website](#) in the coming weeks.

We look forward to your Parliament's strong participation in this important event.

Yours sincerely,

Hon. Dr. Tulia Ackson
President of the IPU

H.E. Mr. Philemon Yang
President of the UN General Assembly



Inter-Parliamentary Union
For democracy. For everyone.

Parliamentary Hearing at the
United Nations



PRESIDENT OF THE GENERAL ASSEMBLY

***Scaling up action for the
Sustainable Development Goals:
Finance, Institutions, and Politics***

UN Headquarters, New York

13 and 14 February 2025

Programme

Moderator: **Dan Dunskey**, Journalist

Thursday, 13 February	
10:00–10:15	Welcome remarks
	H.E. Mr. Philemon Yang , President of the United Nations General Assembly Hon. Dr. Tulia Ackson , President of the Inter-Parliamentary Union
10:15–10:45	Interactive survey
	Participants will be invited to respond to a few questions designed to identify basic positions and trends. The survey will be conducted on Mentimeter.com and will require participants to use their phones or tablets.
10:45–11:45	The deep challenge of the SDGs: Mobilizing political will
	The SDGs constitute the most comprehensive global plan to set economies and societies on a sustainable path and to tackle the root causes of poverty and inequality, advancing social justice and creating the conditions for peace. With only a fraction of the goals on track globally, and just five years left before their 2030 expiration date, parliamentary action to help implement the goals is more urgent than ever. Although the SDGs were adopted by consensus at the global level, national ownership of the goals remains weak. Not all political forces in each country have adopted the SDGs as a shared agenda to drive policy at the national level. Many parliaments remain divided as to the actual policies required for the implementation of the SDGs. Further complicating this picture is an underlying scepticism that support for the SDGs can be sustained over a long time regardless of each country's political struggles. Guiding questions: • What explains relatively low levels of national ownership for the SDGs? • How can parliaments overcome conflictual politics that interfere with policies that advance the SDGs? • How can political momentum for the SDGs be reconstituted in the run up to the 2030 deadline?

	How can existing cooperation frameworks between the UN and parliaments help turbocharge political engagement regarding SDG implementation?
11:45–13:00	Parliamentary oversight of the SDGs: The unfinished business of institutionalization
	IPU surveys and government reports show that, despite some progress, parliamentary engagement in the SDGs remains uneven and unfocused. Few parliaments have institutionalized the SDGs so that parliamentarians are fully familiar with the goals and have the capacity to oversee their implementation in a sustained manner through legislation and budgetary allocations. Most notably, parliamentary oversight of national progress reports to the UN has remained stagnant over the years without ever achieving a critical mass. An SDG accountability “culture” has yet to take root in most parliaments so that laws and budgets are consistently tested against national plans for the SDGs and all relevant communities, including women, youth and the most vulnerable, are appropriately engaged and represented. Despite their popularity, parliamentary bodies for the SDGs such as committees and caucuses have produced limited results. Guiding questions: - How can parliamentary structures and practices for the SDGs be strengthened? - What is required to bring about a whole-of-parliament effort for the SDGs? - What other institutions must be mobilized and strengthened to support parliamentary oversight of the SDGs?
13:00–15:00	Lunch break
15:00–16:30	Development cooperation and the SDGs: Making the most of aid
	Official development assistance (ODA) and other sources of foreign aid are a central pillar of the financing for the achievement of SDGs in many developing countries. ODA is being disproportionately allocated to humanitarian assistance and refugee costs as well as to climate mitigation at the expense of core support for public goods and infrastructure spending in developing countries. Moreover, despite the importance of collective action to provide developing countries with the necessary financing and technologies to accelerate the implementation of the SDGs, geopolitical tensions and the resurgence of nationalism are hindering international cooperation and coordination. In 2023, the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)’s Development Assistance Committee contributed a total of US\$ 223.7 billion in programmes and direct budget support toward developing countries. While this amount represents a considerable nominal increase over the past decade, it is still only half of the commitment of 0.7% of GNI in global aid as set out in the Addis Ababa Action Agenda. Besides aggregate figures, the quality of foreign aid, i.e., the specific allocation and expenditure modalities to make the most of aid, is often lacking. Key principles of aid effectiveness, such as national ownership, accountability and managing for results, are inconsistently applied. As the number of development cooperation actors increase, including new multilateral development banks and new donors from emerging economies, coordinating aid in recipient countries becomes more challenging and the financial size of aid decreases. Governance and in particular the lack of representation of developing countries in the international financial institutions, are additional factors which can undermine the overall volume and quality of aid.

	Guiding questions: • How can parliamentary oversight of the budget and other key aid processes be strengthened in both donor and recipient countries? • As a form of public finance, can aid be used to catalyze private investments and other flows of development finance? • What reforms are needed at national and global levels to make aid more effective?
16:30–18:00	Raising domestic resources for the SDGs: A case for tax reforms
	There is a growing understanding among Member States of the importance of expanding and mobilizing domestic public resources to achieve the goals and targets of the 2030 Agenda. As indicated in the Addis Ababa Action Agenda, domestic public resources should contribute directly to public goods and services such as infrastructure, health and education. In the long term, this can contribute to poverty reduction, greater economic growth and increased trust in governments. Since 2000, while there has been an increase of tax revenue as a global average, various financial, health and economic crises have caused this growth to be unstable. In addition, national reforms are needed to redistribute the tax burden more fairly between different classes of contributors and generally to boost tax collection, including by building capacity to fight tax evasion. There is also room for innovative ideas such as maritime and aviation transport taxes that can help poor countries finance the climate transition. Over the past years more attention has been paid to international tax cooperation which includes multilateral tax cooperation instruments, transforming the international tax cooperation landscape and enabling progress to combat tax avoidance, with the aim of ensuring that no countries are left behind. In this connection, intergovernmental negotiations towards a United Nations Framework Convention on International Tax Cooperation will start in February 2025. Guiding questions: • What are the most important tax collection issues at national and global levels, and are current reform proposals strong enough? • How can parliaments help ensure better compliance with national and global tax rules? • Is there political support for financial transaction taxes and other such innovative taxes to support global public goods?
Friday, 14 February	
10:00–11:30	The debt crisis and the SDGs: Proposals for sustainable solutions
	The ongoing debt crisis is a development crisis. According to the United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), the global public debt reached a record US\$ 97 trillion in 2023. Unsustainable debt servicing obligations have become a major roadblock to the implementation of the SDGs in many developing countries, as 54 developing countries spend more than 10% of their revenues on net interest payments and 3.3 billion people live in countries that spend more on interest payments than on education or health. Developing countries are almost always in a position of dependency vis-à-vis foreign lenders and global financial markets. While much of the global response to this problem tends to focus on debt relief, a comprehensive, sustainable solution must consider the whole debt cycle. This begins by looking at debt sustainability assessments which would include the structural causes of unsustainable borrowing, development spending needs, better capture vulnerabilities and

	risks and the different debt instruments from public and private sources that are available to countries in need. As debt service burden is set to remain elevated for several years, more needs to be done for financing options to reduce the risk of liquidity crises. To prevent the debt crisis further escalating the development crisis, a new multilateral debt workout mechanism bringing all creditors together needs to be considered along with actions to strengthen governance of the global financial system, which today includes non-banking actors, institutional investors, asset managers and other market players. Work has been done in international forums on debt such as the G20 Common Framework which aims to ensure a more development-oriented international debt architecture. The recently adopted Pact for the Future calls to accelerate the reform of the international financial architecture to make the system more inclusive and improve the participation of developing countries. Additional transformations are also needed to the system such as scaling up affordable long-term finance and providing greater liquidity in times of crisis. Guiding questions: • How can parliaments strengthen their oversight of government debt? • What measures are needed to better regulate the financial sector nationally and globally? • What additional solutions can be presented to tackle the debt crisis?
11:30–13:00	International trade for the SDGs: The challenge of poverty eradication through export-led growth
	International trade can help developing countries generate revenue that can contribute to economic growth and lead to the reduction of poverty and financing for sustainable development. Countries in special situations such as the least developed countries (LDCs), small island developing states (SIDS) and landlocked developing countries (LLDCs) remain largely marginalized in international trade due to their limited scale and undiversified nature of their economies, geographical remoteness, lack of access to the sea, major trading ports and world markets, high dependence on external markets, and vulnerability to natural hazards and disasters. Entire sectors of the global economy, such as financial services and technology, are led by developed countries and a few emerging economies, offering little opportunities for the integration of developing countries which remain largely marginalized. Developing countries continue to face tariff and nontariff barriers to their exports while being pushed to give free rein to foreign investors by relaxing their own regulatory environments. Correspondent banking, a lack of an enabling business environment and limited access to affordable financing in developing countries also present challenges. The Pact for the Future states its commitment to “a rules-based, non-discriminatory, open, fair, inclusive, equitable and transparent multilateral trading system, with the World Trade Organization at its core”. Additional reforms that can take place are the facilitation of accession to the World Trade Organization, especially for developing countries, and the promotion of trade and investment liberalization and facilitation. It is evident that the current Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) does not provide sufficient flexibility to protect industries such as those based on traditional knowledge and handicrafts. The Investor-State Dispute Settlement is often accused of being inherently biased in favour of large multinational enterprises acting against the ability of developing countries to legislate for the public welfare.

	Guiding questions: • How can parliaments help address some of the most important sticking points in the current multilateral trade and investment regime? • Given the highly competitive global marketplace, how sustainable is the export-led growth model and can all countries replicate it? • How can countries move up the value chain through trade and foreign investments?
13:00–15:00	Lunch break
15:00–16:45	Private investments for the SDGs: The role of private long-term investments and of international finance
	The financing of the SDGs is estimated to range between 2.5 to 4 trillion US dollars over the next five years. While governments can garner investments in infrastructure and services from the public, private investors, with their capacity to tap financial markets, are seen as essential to target 17 of SDG 17. Focused on the “means of implementation”, target 17.17 includes a commitment to scale up public-private partnerships (PPPs) to help mobilize private investments. Private business activity, investment and innovation are also included in the Addis Ababa Action Agenda. The private sector involvement in the implementation of the 2030 Agenda includes PPPs as well as foreign direct investments and private capital mobilization, which have all declined due to the shift to digital business models. It has also led to underinvestment in various sectors, such as energy and infrastructure, and developing countries, particularly countries in special situations including LDCs, LLDCs and SIDS. For private sector investment to improve, there needs to be an equivalent improvement of the business enabling environment, which should include policies on investor and consumer protection and fair competition, as well as structural changes in reshaping private investments. Solutions can include the mobilization of innovative types of private finance, including through blended finance as well as capacity building support for projects and aligning private business and finance with the SDGs. Guiding questions: • How can the private sector be incentivized to invest while establishing mechanisms to avoid negative consequences? • How can public engagement in and oversight of the private sector be strengthened, including through parliaments?
16:45–17:00	Closing
	Dr. Tulia Ackson , President of the Inter-Parliamentary Union



2025 Parliamentary Hearing at the UN

New York, 13-14 Feb 2025

Trusteeship Council Chamber

10.45 – 11.45

Thursday, 13 February 2025

The deep challenge of the SDGs: Mobilizing political will

LATAR BELAKANG INFORMASI

- Laporan terkini SDGs yang disusun PBB pada 2024 menyebut dari 135 target (total 169 target) yang dapat dievaluasi menggunakan acuan dasar data 2015 hingga sekarang, hanya 17% target yang sesuai jalur (*on-track*) pencapaian pada 2030, 48% berada pada *moderate* dan *marginal progress*, 18% stagnan dan 17% mengalami kemunduran (*regression*) dibandingkan 2015. Selain itu, masih ada sekitar 34 target SDGs yang tidak dapat dianalisis karena kurangnya data perkembangan.¹
- UNESCAP (Asia Pasifik) memperkirakan pencapaian SDGs di kawasan tersebut dapat terwujud pada 2062, 32 tahun setelah tenggat waktu SDGs pada 2030.²
- Pendanaan masif yang diperlukan hingga tantangan krisis global baik kesehatan (pandemi) maupun keamanan (konflik dan perang), menjadi bagian dari faktor pendorong masih belum kuatnya kepemilikan nasional (*national ownership*) dari SDGs.
- Kesenjangan kebutuhan pendanaan yang harus terpenuhi untuk SDGs mendorong pengambil kebijakan ataupun aktor politik untuk fokus mengatasi atau memenuhi janji politik skala pendek. Pun demikian dengan meningkatnya instabilitas maupun ketegangan antarnegara di berbagai belahan dunia yang mendorong pemerintahan setempat untuk fokus pada isu keamanan lebih banyak ketimbang SDGs.
- Di Indonesia, para pemangku kepentingan berupaya semaksimal mungkin untuk memperkuat kepemilikan nasional dari SDGs mengingat pada dasarnya tujuan SDGs adalah juga merupakan bagian dari tujuan pembangunan nasional. Langkah-langkah tersebut dilakukan dengan:
 1. Melokalkan SDGs dengan mengganti terminologi menjadi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dan mengintegrasikan SDGs ke dalam rencana pembangunan nasional hingga daerah.
 2. Pada 2017, Indonesia berkomitmen terhadap SDGs melalui Perpres No 59 Tahun 2017 yang memandatkan pembentukan Tim Koordinasi Nasional TPB hingga penyusunan rencana aksi nasional (RAN) dan rencana aksi daerah (RAD) TPB. Perpres No 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian TPB yang memberi dasar hukum bagi pendanaan inovatif seperti *SDGs Bond*.

¹ <https://unstats.un.org/sdgs/report/2024/The-Sustainable-Development-Goals-Report-2024.pdf>

² United Nations. (2024). Asia and the Pacific SDGs Progress Report: Showcasing Transformative Actions 2024 (ST/ESCAP/3125).



2025 Parliamentary Hearing at the UN

New York, 13-14 Feb 2025

3. Penguatan peran pengawasan dan diplomasi parlemen melalui Panja TPB dan Panja-Panja isu spesifik yang berkaitan dengan TPB lainnya di BKSAP maupun AKD lainnya.
4. Pencapaian SDGs Indonesia → lebih dari separuh (61,4% dari 233 indikator yang tersedia datanya. TPB memiliki sekira 319 indikator) berstatus *on track*.



2025 Parliamentary Hearing at the UN

New York, 13-14 Feb 2025

SUGGESTED POINTS OF INTERVENTION

***Distinguished Panelists,
Honorable Delegates,
Ladies and Gentlemen,***

Thank you for giving me the floor,

- It is interesting to hear from the panel about the challenges in forging national ownership of SDGs.
- Several issues are affecting the level of SDGs national political will, such as the financing gap; the emergence of some global crises diverting the SDGs attention to national survivability; and the relatively short period of the SDGs that request countries, irrespective of their level of development, to meet the goals within only 15 years.
- At the same time, politicians are juggling to fulfill their short-term election promises and long-term national development vision, which all require financing.
- Failing to meet this can lead them to lose their grip on power.
- These are no exception to Indonesia. Yet, we need to understand that the SDGs are basically something that every nation is also pursuing.
- Therefore, Indonesia has boldly adapted and synchronized the SDGs into our short-, medium-, and long-term national development plan.
- In addition, we swiftly moved to formalize the SDGs soon after they were adopted. In 2017, a legally binding instrument at the government level provided a legal framework to support the implementation of SDGs.
- The instrument enables Indonesia to localize the SDGs, strengthen the multistakeholder partnership, and innovate the SDGs funding schemes.
- At the parliament, we continuously advocate the government to achieve the SDGs by using all the available constitutional means that we have.
- As a result, around 69,43% of the total SDGs targets in Indonesia have been achieved, putting the country at the 78th out of 193 countries according to the SDGs Index.³
- The Indonesian House therefore concludes that the first step to enabling a political will on this issue is to provide an instrument that can serve as a legal framework at the national level.
- In this connection, I am therefore curious to hear the panelists' perspectives on the prospect of having a legally binding global development instrument in the future. Is that something that can be achieved and pursued by all UN Member States?

Thank You.

³ <https://dashboards.sdgindex.org/rankings>

The deep challenge of the SDGs: Mobilizing political will



2025 Parliamentary Hearing at the UN

New York, 13-14 Feb 2025

Trusteeship Council Chamber
11.45 – 13.00
Thursday, 13 February 2025

Parliamentary Oversight of the SDGs: The Unfinished Business of Institutionalization

LATAR BELAKANG INFORMASI

- Dalam dokumen [UN Declaration Transforming Our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development](#) (A/RES/70/1) yang menjadi dokumen politik SDGs, peran parlemen disebut secara eksplisit dalam kapasitas legislasi, anggaran, dan pengawasan (paragraf 45), pelibatan parlemen dalam SDGs (paragraf 52), keterlibatan parlemen dalam rewiu perkembangan pencapaian SDGs (paragraf 79).
- Pada sesi Sidang Umum PBB ke-77, 2022, resolusi pertama terkait peran parlemen [Enhancing the role of parliaments in accelerating the achievement of the Sustainable Development Goals](#) (A/RES/77/159) disepakati oleh negara anggota. Resolusi tersebut mendorong negara anggota agar melibatkan parlemen dalam penyiapan *Voluntary National Review* (VNR), proses pelaporan sukarela negara anggota terkait perkembangan pencapaian SDGs via UN HLPF on Sustainable Development.
- Indonesia sejauh ini telah menyampaikan VNR terkait SDGs sebanyak tiga kali pada 2017, 2019, dan 2021. Pada 2025 ini, Indonesia juga dijadwalkan menyampaikan kembali laporan VNR mereka. Peluncuran pertemuan untuk merumuskan VNR 2025 telah dimulai oleh Bappenas pada Rabu, 5 Februari 2025 dengan fokus pada Goal 5 (Kesetaraan Gender), 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi), 14 (Ekosistem Lautan), 17 (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan).
- IPU mencatat keterlibatan parlemen dalam SDGs meskipun mengalami perkembangan tetapi masih tidak merata dan tidak fokus. Secara umum, pengawasan parlemen dalam laporan perkembangan nasional ke PBB relatif stagnan selama beberapa tahun.
- DPR selama ini telah melakukan upaya pengarusutamaan SDGs di tingkat legislatif melalui penguatan pemahaman SDGs, pembentukan Panja SDGs maupun isu terfokus SDGs di BKSAP dan AKD lainnya. BKSAP DPR RI juga mengembangkan [Portal Monitoring SDGs DPR RI](#) berisi data-data pencapaian SDGs yang dapat digunakan oleh anggota DPR RI untuk pengawasan hingga ke tingkat konstituen.
- Pertanyaan mengemuka dari panel diskusi kali ini adalah bagaimana struktur dan praktik keparlemenan SDGs dapat diperkuat, institusi apa yang dapat dimobilisasi untuk memperkuat peran DPR terkait SDGs, hingga apa yang diperlukan untuk membawa upaya menyeluruh dari parlemen terkait SDGs.
- Pada April 2021, BKSAP melakukan FGD sekaligus memperkuat proses keterlibatan parlemen dalam VNR Indonesia bertajuk [the SDGs and COVID-19](#)



2025 Parliamentary Hearing at the UN

New York, 13-14 Feb 2025

[Pandemic: Road to Indonesia VNR 2021](#). FGD dimaksud melibatkan Bappenas dan IPU, sekaligus sebagai upaya ujicoba penggunaan [IPU Self Assessment Toolkit](#), yang mengkaji sejauhmana proses internalisasi SDGs di parlemen.

- Laporan VNR [2019](#) dan [2021](#) yang disampaikan Indonesia di UN HLPF telah menggarisbawahi proses penyusunan yang melibatkan parlemen dalam porsi konsultasi. Kendati demikian, proses keterlibatan dalam penyusunan VNR masih perlu didorong lebih dalam, khususnya dalam peran keterlibatan secara teknis.
- DPR juga terlibat secara aktif dalam upaya pengarusutamaan SDGs dan mendorong penguatan praktik cerdas terkait SDGs. Selain melalui IPU, BKSAP juga terlibat melalui GOPAC sejak dini dalam penyusunan Buku Panduan [Parliament's Role in Implementing the SDGs](#). Buku Panduan yang disusun bekerjasama antara GOPAC-ISDB-UNDP tersebut memberikan gambaran mengenai langkah-langkah awal yang perlu dilakukan parlemen terkait SDGs beserta praktik cerdasnya.



2025 Parliamentary Hearing at the UN

New York, 13-14 Feb 2025

SUGGESTED POINTS OF INTERVENTION

***Distinguished Panelists,
Honorable Delegates,
Ladies and Gentlemen,***

Thank you for giving me the floor,

- The Indonesian House of Representatives mainstreams the SDGs through numerous platforms and mechanisms. For several years, we have established a Working Group on SDGs (Panja SDGs) to mainstream the SDGs and strengthen any SDGs-related parliamentary measures.
- In addition, through the Committee for Inter-Parliamentary Cooperation, Indonesia has been involved in the global SDGs parliamentary diplomacy to share experiences and lessons learned on SDG implementation through the World Parliamentary Forum on SDGs and the First Global Parliamentary Meeting on SDGs, the latter was co-organized with the IPU in 2021.
- Parliament also develops SDGs Monitoring Dashboard as an oversight platform through disaggregated data that can be used by Members of Parliament at their constituency.
- Parliament also involves the VNR formulation process in all of three previous reporting. This year, Indonesia will have its fourth VNR, and we will remain involved in its consultation.
- The Indonesian House remains steadfast in strengthening its commitment to the SDGs. Several legislation proposals relevant to achieving the SDGs, such as the Climate Change Management Bill, Food Production and Business Management System Bill, and New and Renewable Energy Bill, have been tabled for further deliberation in parliament.
- Yet we are aware that the SDGs' oversight mechanism needs to be strengthened and requires multistakeholder support. This includes the government's complete willingness to engage parliament in all aspects of the SDGs process, including in the VNR formulation.
- The Indonesian House thus calls for full implementation of the UN Resolution on Enhancing the Role of Parliaments in Accelerating the Achievement of the SDGs adopted at the 77th Session of the UN General Assembly (GA) in 2022, which encourages the involvement of parliament in VNR preparation.

Thank You.



2025 Parliamentary Hearing at the UN

New York, 13-14 Feb 2025

Trusteeship Council Chamber

15.00 – 16.30

Thursday, 13 February 2025

Development Cooperation and the SDGs: Making the Most of Aid

LATAR BELAKANG INFORMASI DAN ISU TERKINI

- *Official Development Assistance* (ODA), merupakan bentuk bantuan pembangunan dari negara maju yang dinyatakan sebagai bagian program resmi dan kesepakatan dari upaya mobilisasi sumber daya untuk pembangunan. [Monterrey Consensus](#) pada 2002 menunjukkan bagaimana komunitas global menyepakati ODA ke negara berkembang pada kisaran 0,7% dari Produk Domestik Bruto (PDB) negara maju, dan 0,15-0,2% dari PDB negara maju untuk negara tertinggal (*Least Developed Countries/LDCs*).
- ODA adalah bagian utama dari pembiayaan untuk pembangunan sejak disepakati oleh OECD's Development Assistance Committee (DAC) sebagai standar tertinggi bantuan asing pada 1969.
- Pada 2023, ODA dari negara anggota DAC meningkat mencapai US\$ 223 miliar, peningkatan 1,6% dari 2022. Lima negara berhasil melampaui target 0.7% dari PDB yang disepakati di PBB : Norwegia (1,09%), Luxemburg (0,99%), Swedia (0,93%), Jerman (0,82%), Denmark (0,73%).
- Kendati demikian, dari sisi nominal, Amerika Serikat memegang proporsi ODA terbesar yakni senilai US\$ 37,9 miliar (0,24% PDB). Sementara di urutan kedua adalah organisasi Uni Eropa senilai US\$ 26,87 miliar dan ketiga adalah Jepang dengan US\$ 19,6 miliar (0,44% PDB).
- Diskursus ODA kerap kali berfokus pada bagaimana bantuan asing menjadi alat pengaruh politik, meningkatkan ketergantungan pada negara donor, hingga inefektivitas pengelolaan dana bantuan dimaksud. Di sisi lain, ODA mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan akses ke kesehatan dan pendidikan, maupun membantu pendanaan pembangunan negara berkembang dan tertinggal akibat minim sumber daya.
- Dengan pertimbangan kebutuhan akan efektivitas ODA, komunitas global melalui Global Partnership for Effective pada 2011, komunitas global melalui Global Partnership for Effective Development Cooperation (GPEDC) menyepakati prinsip-prinsip kunci untuk efektivitas dana bantuan yakni: (i) kepemilikan nasional, (ii) fokus pada hasil, (iii) kemitraan inklusif, dan, (iv) akuntabilitas dan transparansi bersama.
- Namun demikian, pelaksanaannya juga inkonsisten. Banyak donor yang kerap menerapkan syarat-syarat tertentu yang mendikte hasil ketimbang mendukung negara penerima bantuan menggunakan bantuan tersebut untuk program nasional mereka.



2025 Parliamentary Hearing at the UN

New York, 13-14 Feb 2025

- Di sisi lain, meningkatnya aktor donor yang tidak hanya negara tetapi juga lembaga dan organisasi internasional, membuka peluang tumpang tindih bantuan untuk program serupa, hingga mengancam efektivitas pelaksanaan program dan mengganggu dampak.
- Di sisi lain, kondisi bantuan asing juga semakin menurun. Terlebih baru-baru ini, Amerika Serikat menghentikan seluruh bantuan asing mereka selama 90 hari untuk evaluasi. USAID yang menjadi badan donor AS terancam tutup. Berdasarkan data, total bantuan internasional AS pada 2023 mencapai US\$ 68 miliar dengan anggaran di USAID senilai US\$ 40 miliar. Sementara itu, AS adalah donor dana bantuan asing terbesar secara nominal.
- Parlemen di negara donor maupun penerima memiliki peran kunci dalam memastikan efektivitas dana bantuan. Hal ini penting mengingat segala pembiayaan pembangunan adalah bagian anggaran yang menjadi domain kewenangan parlemen.
- Pasal 23 UU Keuangan Negara (17/2003) menegaskan peran DPR dalam menyetujui pemberian hibah/pinjaman kepada ataupun penerimaan hibah/pinjaman dari pemerintah/lembaga asing. UUD 1945 juga telah menegaskan perlunya persetujuan DPR apabila Presiden membuat perjanjian internasional yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara (Pasal 11 ayat 2).



2025 Parliamentary Hearing at the UN

New York, 13-14 Feb 2025

SUGGESTED POINTS OF INTERVENTION

***Distinguished Panelists,
Honorable Delegates,
Ladies and Gentlemen,***

Thank you for giving me the floor,

- Indonesia receives support from the global partnership through numerous schemes. In ensuring its effectiveness, the amount we receive and how we spend the aid is another tough question.
- In Indonesia, our Constitution mandates approval from the House for any international agreement that will create a burden to the public budget. Article 23 of the Law on State Finance instructs the government to seek approval from Parliament for any lending or grant-giving or -receipt.
- However, the approval is generally within the context of the public budget. In most cases, the government's explanation of the aid is macro, taking details of the donors, the amount, the program, and even the progress out of the equation.
- A parliament that is well-informed on the details can assess how international aid is effectively being implemented and how it can contribute best to implementing national SDGs.
- Having been aware of such challenges, the Indonesian House established a Budget Analytical and Public Account Center to provide legislative expertise support on public finance and further monitor the budget's effectiveness and how it is spent.
- But we also note that less international support is available to strengthen the parliament's capacity in the exercise of its functions. A stronger parliament means better accountability and better accountability can drive aid effectiveness.
- The upcoming 4th International Conference on Financing for Development in Sevilla, Spain, 30 June-3 July 2025, should be a momentum to ensure that international assistance remains one of the primary resources to support the SDGs in developing countries, irrespective of the US decision to freeze the aid.
- It is also high time for other developing countries to fulfill their promises of 0.7% ODA.
- It is a moment for us to also call upon international donors to focus on strengthening the parliamentary capacity as a way to ensure international SDGs aid effectiveness.

Thank You.

Development Cooperation and the SDGs: Making the Most of Aid



2025 Parliamentary Hearing at the UN

New York, 13-14 Feb 2025

Trusteeship Council Chamber
16.30 – 18.00
Thursday, 13 February 2025

Raising domestic resources for the SDGs: A case for tax reforms

LATAR BELAKANG INFORMASI

- Kesenjangan pendanaan SDGs masih menjadi tantangan bagi negara berkembang, termasuk Indonesia. → Kebutuhan pendanaan SDGs Indonesia hingga 2030 pascapandemi diperkirakan mencapai Rp 122.000 triliun, dengan kesenjangan pendanaan sebesar Rp 24.000 triliun (US\$ 1,7 triliun).
- Salah satu instrumen pembiayaan domestik untuk mengatasi kesenjangan pendanaan adalah berasal dari pajak. Namun transaksi lintasbatas mendorong upaya dari korporasi global melakukan pengemplangan pajak melalui praktik *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS) atau Penggerusan Pajak dan Pengalihan Laba.
- Kendati telah ada perjanjian anti penghindaran pajak, praktik BEPS tetap terjadi karena sifat perjanjian yang ada merata berstatus bilateral.
- Melalui OECD/G20 Inclusive Framework yang beranggotakan [147](#) negara/jurisdiksi (termasuk Indonesia), Kebijakan Solusi Dua Pilar atau Global Anti-Base Erosion (GloBE) Rules disepakati pada Oktober 2021. Aturan tersebut memastikan korporasi multinasional skala besar membayar tingkat pajak minimum (*global minimum tax/GMT*) pada pendapatan yang diterima di masing-masing jurisdiksi mereka beroperasi.
- GloBE menerapkan GMT sebesar 15% bagi korporasi multinasional skala besar dengan peredaran bruto lebih dari 750 juta Euro.
- Selain meningkatkan kapasitas fiskal, GMT mewujudkan keadilan hak perpajakan antara negara sumber dengan negara tempat korporasi multinasional berdomisili. Namun tantangan juga muncul bagi Indonesia dan negara berkembang mengingat insentif pajak untuk menarik investasi asing seperti *tax allowance*, *tax holiday*, dan *super deduction tax* menjadi tidak efektif.¹
- Pada Desember 2024, Sidang Umum PBB mengadopsi Term of Reference untuk pengembangan sebuah Kerangka Konvensi PBB untuk Kerja Sama Internasional tentang Perpajakan (*UN Framework Convention on International Tax Cooperation / UFCITC*). PBB juga telah membentuk Komite Negosiasi Antarpemerintah (*Intergovernmental Negotiation Committee/INC*) dan akan mulai bekerja pada Februari ini.

¹ <https://pajak.go.id/id/artikel/menjuju-kesetaraan-dengan-global-minimum-tax>



2025 Parliamentary Hearing at the UN

New York, 13-14 Feb 2025

-
- Sejumlah negara seperti Amerika Serikat, saat voting keputusan Desember 2024 silam, menyampaikan kekhawatirannya mengenai potensi tumpang tindih pengaturan kerja sama internasional perpajakan PBB dengan yang telah disepakati oleh OECD/G20 Inclusive Framework.
 - Di sisi lain, pelaksanaan GMT untuk korporasi multinasional berskala besar telah berlaku di Indonesia per Januari 2025 melalui [PMK 136/2024 tentang Pengenaan Pajak Minimum Global Berdasarkan Kesepakatan Internasional](#).
 - Debat akan mengundang peserta bercerita mengenai situasi perpajakan terkini dan berpendapat mengenai rencana kerja sama internasional perpajakan.



2025 Parliamentary Hearing at the UN

New York, 13-14 Feb 2025

SUGGESTED POINTS OF INTERVENTION

***Distinguished Panelists,
Honorable Delegates,
Ladies and Gentlemen,***

- Taxation is the fastest option to mobilize domestic resources and increase the country's income. However, tax collection is so challenging that a balance needs to be struck between putting more taxation burden on the ordinary or the wealthy.
- In our recent case, we choose the latter.
- The Government's plan to increase the value-added tax (VAT) on goods and services from 11 % to 12% in 2025 has sparked a debate among the people. Many were furious, given that the economic situation was not going quite well for everyone.
- The Indonesian House previously, under a promising economic projection, adopted a Law on Taxation Regulation Harmonization 2021, which gave the legal framework for the VAT increase. The potential income from the policy reaches Rp 75 trillion or around US\$ 4,6 billion.
- Due to the public outcry the Indonesian House demanded that the Government withdraw the proposal and strike a balance between following the regulations and taking a fair position on the issue.
- As a result, a VAT increase of 12% remains, but only for luxury goods and services. It is always easy to increase taxes, but fairness and equity for those in need are also a priority.
- On that note, the Indonesian House believes that international tax cooperation should also touch upon the issue of fairness and equity, including when dealing with those huge multinational corporations operating over the top (OTT).
- Under the OECD/G20 Inclusive Framework, Indonesia has started implementing the Global Minimum Tax (GMT) of 15% for multinational corporations operating in Indonesia.
- The Indonesian House expects the UN Framework Convention on International Tax Cooperation (UNFCITC) to complement what the OECD/G20 Inclusive Framework has achieved without reinventing the wheel, and address challenges raised by the digital economy in balanced, fairness and equity.
- Given the complex nature of taxation itself. I want to hear your perspectives about the possible arrangements that might arise from the convention's development. Should the convention take over the GMT rules or act as a skeleton part for any other relevant international tax agreements?

Thank You.



2025 Parliamentary Hearing at the UN

New York, 13-14 Feb 2025

Trusteeship Council Chamber

10.00 – 11.30

Friday, 14 February 2025

The debt crisis and the SDGs: Proposals for sustainable solutions

LATAR BELAKANG INFORMASI

- UN Trade and Development (UNCTAD) mencatat utang pemerintah secara global mencapai rekor US\$ 97 triliun pada 2023. [Laporan UNCTAD](#) juga mengungkap utang publik di negara-negara berkembang mencapai US\$ 29 triliun, 30% dari nilai global. Meningkat 16% dari 2010 dengan sepertiga dari utang negara berkembang tersebut berada di Asia dan Oceania, sementara Latin Amerika dan Karibia 17% dan Afrika 6%.
- Beban utang bervariasi dan berkaitan erat dengan kemampuan negara untuk membayar dan juga melekat dengan ketidaksetaraan yang paten di arsitektur keuangan internasional yakni mereka yang tidak mampu membayar lebih.
- Laporan juga mengungkap sekitar separuh negara berkembang mengalokasikan rata-rata 8% pendapatan untuk pembayaran bunga pinjaman. Pada 2023 sebanyak 54 negara berkembang, hampir separuh di antaranya berada di Afrika, mengalokasikan 10% pendapatan untuk membayar bunga. Situasi ini mengganggu alokasi anggaran pelayanan publik untuk kesehatan ataupun pendidikan yang semestinya bisa dianggarkan oleh negara (hlm 16).
- Data juga menunjukkan sekira 3,3 miliar penduduk global (2,2 miliar di Asia dan Oceania) tinggal di negara yang belanja bunga utangnya lebih tinggi daripada anggaran kesehatan, sementara sekira 2,1 miliar penduduk global (1,8 miliar di Asia dan Oceania) tinggal di negara yang belanja bunga utang lebih tinggi dari pendidikan (hlm 18).
- [Buku II Nota Keuangan APBN 2025](#) mencatat rencana pemerintah untuk pembayaran bunga utang senilai Rp 552,85 triliun (tabel 5. Lampiran I). Dengan total pendapatan APBN mencapai Rp 3.000 triliun maka dengan mengikuti pola laporan UNCTAD, proporsi pembayaran bunga utang mencapai sekitar **18%** (Catatan: anggaran kesehatan Rp 218 triliun dan anggaran pendidikan sekitar Rp 700 triliun, di luar rencana efisiensi anggaran).
- Pusat Kajian Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara, Badan Keahlian DPR RI mencatat proporsi pembayaran bunga utang Indonesia semakin membebani fiskal dan memperkecil ruang untuk produktif. Sejak 2015 pembayaran bunga utang telah melebihi 10% setiap tahun dengan puncaknya 19% pada 2020 ([Kumpulan Analisis Siklus Pembahasan Nota Keuangan dan RAPBN 2024 Mitra Komisi XI](#)).
- Demi menghindari potensi krisis utang, G20 telah mengadopsi [Common Framework for Debt Treatment beyond the DSSI \(Debt Service Suspension](#)

The debt crisis and the SDGs: Proposals for sustainable solutions



2025 Parliamentary Hearing at the UN

New York, 13-14 Feb 2025

Initiative), sebagai mekanisme internasional yang membuka peluang restrukturisasi utang bagi negara berpendapatan menengah rendah secara tertata dan terkoordinasi, dengan partisipasi kreditor secara luas.

- Dalam [Pact for the Future](#) yang disepakati di KTT untuk Masa Depan, September 2024, negara-negara mengakui beban utang yang tidak berkelanjutan (*unsustainable debt burdens*) dan bagaimana ia mempengaruhi kemampuan pembangunan di negara berkembang. Langkah yang akan didorong adalah mereformasi arsitektur internasional keuangan melalui di antaranya:
 - (i) Memperkuat respon multilateral untuk mendukung negara dengan beban utang tinggi dan tidak berkelanjutan dengan partisipasi multipihak,
 - (ii) mengundang IMF untuk memperkuat dan meningkatkan arsitektur utang luar negeri (*sovereign debt architecture*),
 - (iii) mendorong penggunaan lebih besar *debt swaps* untuk SDGs.
- Berkaca dari krisis keuangan di Asia pada 1997, Indonesia mengambil pelajaran berharga mengenai kehati-hatian pengelolaan keuangan, terutama dalam pengelolaan beban utang dan defisit negara. DPR RI mengesahkan UU 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengatur pembatasan defisit APBN maksimal 3% dari PDB dan jumlah pinjaman dibatasi maksimal 60% dari PDB. Sementara pada 2015, DPR mengesahkan UU 9 tahun 2016 yang diperkuat melalui UU No 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan untuk mengatur tata kelola penanganan apabila terjadi krisis finansial.
- Dalam membiayai pelaksanaan SDGs, Indonesia juga mengajukan mekanisme utang melalui skema pendanaan inovatif seperti [SDGs Bond](#) yang pada 2021 menghimpun Euro 500 juta.
- Diskusi kali ini mengundang delegasi parlemen untuk berbagi pandangan terkait perannya memperkuat pengawasan utang pemerintah hingga langkah yang diperlukan untuk mengatur lebih baik sektor keuangan baik nasional maupun global.



2025 Parliamentary Hearing at the UN

New York, 13-14 Feb 2025

SUGGESTED POINTS OF INTERVENTION

***Distinguished Panelists,
Honorable Delegates,
Ladies and Gentlemen,***

- The 2023 UNCTAD report revealed that in Asia and Oceania around 2,2 billion people live in countries that spend more on interest than health or education.
- But looking at the financial situation only within a single year of the financial cycle would be unwise, given that at some point, there will be times when the interest payment would be higher than before due to the accumulation of debt. Therefore, we need a way to ensure that each country's debt burden is sustainable and payable under normal circumstances.
- In Indonesia, this has been set up by the Indonesian House through the Law on State Finance, which mandates a deficit limit of no more than 3% of the Gross Domestic Product (GDP) and a borrowing limit of no more than 60% of GDP.
- During the pandemic, a slight deviation was made until 2023, to provide flexibility for the Government in addressing the health crisis.
- Parliamentary oversight is required not just for the program or policy implementation but also to track debt accumulation and its pay back management.
- Formally, the Government should seek the Parliament's approval for the annual debt cap as mandated by the Law on State Finance. Challenges remain in terms of debt amount, its effectiveness, payment capability analysis, and the development of its data library.
- Under the Law on Parliaments, the Indonesian House also re-established a Public Account Committee (PAC) as one of the standing committees which has the role to scrutinize the State Audit Board's findings on the public debt and budget and make a follow-up with regards to those findings.
- In the future, the Indonesian House calls for a more thorough discussion on ways to establish an international standard for sustainable and healthy debt management as well as in the improvement of parliamentary financial oversight role knowledge management.
- It is within our expectation that in the future, a controlled debt will not negatively affect public service spending but sustainably drive more positive outcomes toward it.

Thank You.



2025 Parliamentary Hearing at the UN

New York, 13-14 Feb 2025

Trusteeship Council Chamber
11.30 – 13.00
Friday, 14 February 2025

International trade for the SDGs: The challenge of poverty eradication through export led growth

LATAR BELAKANG INFORMASI

- UN [Pact for the Future](#) yang disepakati di KTT untuk Masa Depan, September 2024, mencakup penegasan komitmen negara anggota akan sistem perdagangan yang berbasis-aturan, non-diskriminatif, terbuka, wajar, inklusif, adil dan transparan, dengan World Trade Organization (WTO) sebagai pusatnya.
- WTO Ministerial Conference (MC) ke-13 yang dihelat di Abu Dhabi, 2024 lalu, dalam deklarasinya juga menekankan keinginan negara anggota untuk menjaga dan memperkuat kemampuan sistem perdagangan multilateral dengan WTO sebagai pusatnya.
- Kendati demikian, sistem perdagangan internasional melalui WTO memerlukan sebuah *reality check*. Ini terjadi karena sejumlah kebuntuan dalam WTO MC13 di antaranya:
 - ~ Sistem perundingan perdagangan internasional yang saat ini berlangsung masih belum dapat menyelesaikan sisa isu Putaran Doha, putaran negosiasi perdagangan kesembilan yang dimulai sejak 2001 silam, yang buntu per 2015 (MC10). Isu-isu yang masih memantik perdebatan yakni soal pertanian (terutama isu *subsidized public stockholding/PSH*), soal subsidi perikanan (khususnya larangan subsidi kepada nelayan yang menimbulkan dampak *over capacity* dan *overfishing*), dan lainnya hingga saat ini masih menjadi bahan negosiasi.
 - ~ Mekanisme penyelesaian sengketa (*dispute settlement body/DSB*) yang sejauh ini belum menemui titik jelas khususnya dalam pengisian pengadilan di *Appellate Body*.
 - ~ Ketidakjelasan pengisian jabatan hakim banding di AB terjadi karena blokade Amerika Serikat sejak 2016 untuk pengisian jabatan hakim banding tersebut dengan alasan adanya personel yang terus menerus menjadi hakim banding. Selain itu, AS juga berargumen hasil banding terlalu jauh melampaui teks tertulis WTO sehingga menghalangi kemampuan AS untuk mengatur kepentingan publik demi melindungi pekerja dan bisnis AS melawan praktik dagang tidak sehat.
 - ~ Ketidakbulatan negara anggota dalam menyepakati isu Investment Facilitation for Development (IFD) yang ditandai penolakan India dan Afrika Selatan, dengan dalih IFD tidak ada dalam agenda Putaran Doha.



2025 Parliamentary Hearing at the UN

New York, 13-14 Feb 2025

- ~ Terakhir sekira 126 negara anggota WTO (termasuk Indonesia) sempat mengusulkan agar naskah perjanjian Investment Facilitation for Development (IFD) masuk menjadi bagian dari [lampiran 4 Perjanjian WTO](#) yang berisi sebelumnya empat perjanjian plurilateral terkait perdagangan di penerbangan sipil, pengadaan barang jasa pemerintah, perjanjian internasional tentang produk pangan susu, perjanjian internasional tentang daging sapi.
- Sementara itu Pakta Masa Depan juga menyepakati, dalam rangka mendukung sistem perdagangan multilateral, negara-negara mendukung pertumbuhan berbasis ekspor di negara berkembang. Di sisi lain, analisis dalam [IMF Working Paper 2008](#), mengungkap perbaikan produktivitas di sektor *tradable* dan *nontradable* dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi bersamaan dengan pertumbuhan ekspor yang lebih tinggi.
 - Perdagangan internasional saat ini juga berada dalam situasi ketidakpastian seiring inkonsistensi negara-negara seperti AS maupun Eropa dalam menerapkan prinsip-prinsip perdagangan.
 - Tambahan Informasi à Rencana Presiden AS Donald Trump untuk mematok tambahan tarif impor sebesar 25% bagi Kanada dan Meksiko, dan 10% bagi Tiongkok, ataupun Uni Eropa (UE) yang merencanakan *phasing out* biofuel kelapa sawit sebagai produk perdagangan ke Eropa dengan alasan perubahan penggunaan lahan yang tinggi – High Indirect Land Use Change (alasan deforestasi) merupakan bagian dari inkonsistensi perdagangan bebas tersebut. Biaya tambahan terhadap arus barang masuk menjadi alat tawar kepentingan negara dimaksud terhadap negara lainnya.
 - Catatanà WTO menyatakan UE sewenang-wenang dan diskriminatif dalam penetapan sawit sebagai biofuel kategori ILUC tinggi sebagai akibat kurangnya pengkajian dan defisiensi data dalam penetapan ILUC tinggi dan rendah. UE juga diketahui menerapkan *less favorable treatment* untuk sawit bila dibandingkan dengan produk biofuel lain asal UE atau dari negara ketiga.



2025 Parliamentary Hearing at the UN

New York, 13-14 Feb 2025

SUGGESTED POINTS OF INTERVENTION

Thank You for giving me the floor,

- Numerous multilateral documents have always emphasized the need for a rules-based, non-discriminatory, open, fair, inclusive, equitable, and transparent multilateral trading system, with the WTO at its core.
- However, from time to time, we have seen trade policies and interests that are out of track from such a multilateralism spirit. The international trade governance, therefore, needs a reality check.
- The multilateral trade system failed to conclude the Doha Round, just when the agenda is all about development, let alone the SDGs. We tend to choose a set of bilateral, regional, or even plurilateral trade agreements over the so-called multilateral trading system.
- Inconsistencies played by countries who tend to cherry-pick the WTO rules for their own benefit are rising.
- Nowadays, trade policy has become a tool of political leverage as showcased by the recent Trump's tariff imposition on goods from Canada, Mexico, and China.
- With so many things remaining on the negotiation table of the WTO, international cooperation seems unlikely to be the driver of trade policy today.
- Thus, before we dive deep into the debate of export-led growth or growth-led export models, we need to answer this question: how can we make the multilateral trading system survive when some of its functions are not working or when the zero-sum game is the playbook of the negotiation?
- We need a stronger parliamentary intervention to urge our government to hold respect for the international governance of the trading system. We need a better parliamentary dimension integrated into the WTO to provide more options for national policies during the negotiation.
- Negotiation is political, and politics is what we are all about.

Thank You.



2025 Parliamentary Hearing at the UN

New York, 13-14 Feb 2025

Trusteeship Council Chamber
15.00 – 16.45
Friday, 14 February 2025

Private investments for the SDGs: The role of private long-term investments and of international finance

LATAR BELAKANG INFORMASI

- Laporan PBB [*Unlocking SDG Financing: Findings from Early Adopters*](#) (2018), mengurai kebutuhan mobilisasi dana untuk pencapaian SDGs secara global mencapai US\$ 3,3 – 4,5 triliun per tahun. Dengan rerata saat itu, kesenjangan pembiayaan baik dari publik maupun investasi swasta dalam sektor-sektor terkait SDGs mencapai US\$ 2,5 triliun per tahun.
- Pasca-COVID19, [*OECD*](#) memperkirakan kesenjangan tersebut meningkat menjadi lebih dari US\$ 4 triliun karena kebutuhan untuk mengatasi dampak ekonomi pandemi dan juga menurunnya investasi swasta.
- Angka tersebut sejatinya hanya sekitar 1% dari aset keuangan global. OECD menyerukan adanya reorientasi lebih baik bagi dana-dana investasi dari pemangku kepentingan baik publik maupun swasta ke kawasan dan komunitas yang sangat membutuhkan.
- Target SDG 17 poin 17 mencakup komitmen peningkatan kemitraan publik swasta untuk mobilisasi pendanaan terkait SDGs. Namun sejauh ini investasi swasta mengalami penurunan. Agar dapat menarik investasi masuk, perbaikan-perbaikan dalam area yang mendukung bisnis diperlukan termasuk perlindungan investor dan konsumen hingga persaingan yang adil.
- Untuk Indonesia, sebelum pandemi kesenjangan pembiayaan untuk mencapai SDGs pada 2030 mencapai Rp 14.000 triliun (sekitar US\$950 miliar). Namun pascapandemi kebutuhan pendanaan hingga 2030 diperkirakan mencapai Rp 122.000 triliun dengan kesenjangan sebesar Rp 24.000 triliun (hampir US\$ 2 triliun).
- Strategi Indonesia untuk pendanaan SDGs melalui tiga wilayah (*three economic engines*) yang mencakup revitalisasi ekonomi konvensional, pengembangan mesin ekonomi baru, serta penguatan ekonomi Pancasila. Secara khusus Indonesia menggunakan berbagai instrumen pendanaan inovatif seperti *blended finance*, obligasi berkelanjutan (*green and blue bonds*), SDG bonds, dan zakat untuk SDGs.
- Laporan Dampak dan Alokasi [*SDGs Bond*](#) 2021 mencatat Indonesia sukses menerbitkan SDGs Bond senilai Euro 500 juta (tenor 12 tahun sejak 2021, kupon 1.31%). Dana yang terkumpul digunakan untuk kesehatan, pendidikan berkualitas, dan industri, inovasi dan infrastruktur. Pada 2022, SDGs Bond kembali terbit



2025 Parliamentary Hearing at the UN

New York, 13-14 Feb 2025

dengan nilai Rp 3,26 triliun (sekitar US\$ 200 juta) dengan tenor 8 tahun dan kupon 7.3%-an.

- Di 2024 SDGs Bond dibuka untuk retail melalui ORI026 dengan tenor 3 hingga 6 tahun dengan kupon 6,3%. Total nilai pemesanan ORI026 mencapai Rp 19,35 triliun (sekitar US\$ 1,1 miliar).
- Dalam konteks menarik investasi swasta, Indonesia bergabung dengan sekira 126 negara anggota WTO dalam mendorong inisiatif Investment Facilitation for Development (IFD) yang mendorong perbaikan tata kelola investasi di dalam negeri. IFD berisi langkah-langkah yang harus dilakukan negara dalam mendorong perbaikan tata kelola dan kebijakan untuk memberikan kemudahan bagi investor dalam berinvestasi di negara terkait.
- Untuk mendorong arus investasi ke Indonesia sejalan dan berkontribusi terhadap pencapaian SDGs, pada 2022 Kementerian Keuangan telah menyusun *Environment, Social, and Governance* (ESG) Framework bagi para pemangku kepentingan dalam proses investasi.
- Selain itu, DPR bekerjasama dengan AIPA, FAO, dan IISD, telah beberapa kali melakukan mekanisme pengarusutamaan investasi di sektor pertanian yang bertanggungjawab sebagai upaya tindaklanjut di level parlemen dalam isu ASEAN Responsible Investment in Food, Agriculture and Forestry (ASEAN RAI). Beberapa lokakarya telah dihelat di Indonesia, dan pada tahun 2025, rencana penguatan kapasitas lebih lanjut untuk parlemen di level ASEAN+Timor Leste akan berlanjut.



2025 Parliamentary Hearing at the UN

New York, 13-14 Feb 2025

SUGGESTED POINTS OF INTERVENTION

***Distinguished Panelists,
Honorable Delegates,
Ladies and Gentlemen,***

- Indonesia believes that everyone must join hand to achieve the SDGs. Utiling only the public resources is not enough.
- Far beyond the pandemic, the funding required to achieve SDGs by 2030 for Indonesia is around Rp 67.000 trillion or around US\$ 4 trillion with a financing gap of Rp 14.000 trillion (US\$ 950 billion). Post-pandemic, the gap is increasing to Rp 24.000 trillion (almost US\$ 2 trillion).
- Indonesia explores funding potential through numerous investment mechanisms such as the sustainable bonds (green and blue bonds), the SDGs bonds, blended finance, and more.
- In 2021, Indonesia launched the first SDGs bond in Asia and successfully gathered Euro 500 million (US\$ 584 million). We then expanded the base of SDGs ownership by offering the bond to retail investors in 2024. That year, we successfully gathered funding of around Rp 19,35 trillion or around US\$ 1,1 billion.
- But a responsible and sustainable investment also means that SDGs ownership is created among the investors.
- In 2022 an Indonesian Environmental, Social, Governance (ESG) framework was launched to spur more responsible and sustainable investment.
- At the parliament level, guided by the notion of responsible investment in food, agriculture, and forestry or ASEAN RAI, the Indonesian House, in cooperation with other international partners, committed to explore potential parliamentary initiatives required to implement the ASEAN RAI which would eventually contributes to the development of ESG regime in Indonesia.
- The Indonesian House, also adopted numerous incentives for investors such as tax holiday, tax credits, land management and facilitation through Law on Job Creation.
- Reform and incentives are required to attract investors to do business in Indonesia. At the same time, resource mobilization through taxation is of importance to explore.
- I would like to hear more from your perspectives regarding ways to manage this financing contradiction when it comes to private sector investment incentives and the application of global minimum tax as a way to mobilize domestic resources.



KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

NOTA DINAS

Nomor:

Kepada : Yth. Plh. Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral
Tembusan : Yth. Seluruh Eselon II Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral
Dari : Direktur Sosial Budaya danOI Negara Berkembang
Lampiran : 2 (dua) berkas
Perihal : Penyampaian Konsep Surat Plh. Dirjen Kerja Sama Multilateral kepada
Sekjen DPR RI perihal Penyampaian Bahan Masukan untuk *Parliamentary
Hearing at the UN dan Women Parliamentary Program to the Munich Security
Conference*, 13 – 16 Februari 2025

Merujuk surat Sekretaris Jenderal DPR RI No: B/15790/KS.01.01/12/2024 dan perihal pada pokok nota, dengan hormat disampaikan konsep Surat Dinas Plh. Dirjen Kerja Sama Multilateral kepada Sekjen DPR RI perihal penyampaian bahan masukan untuk Delegasi DPR RI pada *Parliamentary Hearing at the United Nations* di New York, AS pada 13 – 14 Februari 2025 **dan** *Women Parliamentarians Program to the Munich Security Conference* (MSC) di Munich, Jerman pada 14 – 16 Februari 2025, untuk memperoleh pertimbangan dan persetujuan dari Ibu Plh. Dirjen.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya, diucapkan terima kasih.

Jakarta, Januari 2025

Penny D. Herasati

NIP. 19680202 199403 2 001



KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral

Jl. Taman Pejambon No.6
Jakarta Pusat 10110
E. ditsosbudoinb@kemlu.go.id

T. (6221) 344 1508
F. (6221) 384 9410
W. kemlu.go.id

Jakarta, Januari 2025

Nomor :
Sifat : SEGERA
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penyampaian Bahan Masukan Delegasi DPR RI
untuk *Parliamentary Hearing at the UN* dan *Women
Parliamentary Program to the Munich Security
Conference*, 13 – 16 Februari 2025

Kepada Yth.

Sekretaris Jenderal DPR RI

u.p. Kepala Biro KSAP

di

Jakarta

Merujuk surat Sekjen DPR RI No: B/15790/KS.01.01/12/2024 dan perihal pada pokok surat, dengan hormat disampaikan bahan masukan pertemuan *Parliamentary Hearing at the United Nations* di New York, AS pada 13 – 14 Februari 2025 **dan** *Women Parliamentarians Program to the Munich Security Conference* (MSC) di Munich, Jerman pada 14 – 16 Februari 2025, sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Plh. Direktur Jenderal
Kerja Sama Multilateral

Penny D. Herasati

Tembusan:

1. Yth. Menteri Luar Negeri (sebagai laporan)
2. Yth. Staf Ahli Bidang Hubungan Antarlembaga
3. Yth. Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral

**BAHAN MASUKAN DELEGASI DPR RI
PADA PARLIAMENTARY HEARING AT THE UNITED NATIONS DAN WOMEN
PARLIAMENTARIANS PROGRAM TO THE MUNICH SECURITY CONFERENCE
13 – 16 FEBRUARI 2025**

Daftar Isi

Parliamentary Hearing at the UN

- A. Pencapaian SDG Indonesia Dan Global 2
- B. SDG Financing3
- C. Mobilisasi Komitmen Politik Untuk Pencapaian SDG5
- D. Peran Parlemen Dalam Pencapaian SDG 6

Women Parliamentarians Program To The Munich Security Conference

- E. Perempuan dalam Isu Keamanan7
- F. Isu Keamanan Internasional Mengemuka9
- G. Peran Parlemen dalam Isu Keamanan15

Lampiran

- H. *Country Profile* Dan *Snapshot* Hubungan RI dengan Amerika Serikat
- I. *Country Profile* Dan *Snapshot* Hubungan RI dengan Jerman

Bahan Masukan
Parliamentary Hearing at the United Nations
New York, Amerika Serikat, 13 – 14 Februari 2025

A. Pencapaian SDGs Indonesia dan Global

Latar Belakang dan Perkembangan

1. Agenda 2030 bagi Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) telah diadopsi pada tahun 2015 dan memuat 17 SDGs dan 169 target, serta mencakup tiga dimensi pembangunan berkelanjutan, yaitu sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup.
2. Sebagai komitmen seluruh masyarakat dunia, terdapat mekanisme *follow-up* dan *review* pelaksanaan SDG:
 - a. Regional: kawasan Asia Pasifik dalam kerangka UN-ESCAP *Asia Pacific Forum on SDGs* (APFSD);
 - b. Global: dalam kerangka *ECOSOC High-Level Political Forum on Sustainable Development* (HLPF) – pertemuan tahunan.
3. Di tingkat global, saat ini negara-negara masih *off-track* dalam mencapai target SDGs pada 2030.
 - Berdasarkan laporan PBB, dari 135 target SDGs hanya 17% yang *on track*, sementara 48% mengalami *moderate / marginal progress* dan 18% mengalami stagnasi.
 - Sedangkan 17% target SDGs lainnya mengalami *regression* di bawah pencapaian tahun 2015.
4. Perkembangan pelaksanaan SDGs di kawasan Asia Pasifik dan Asia Tenggara juga lambat dan belum cukup memadai.
 - UNESCAP memperkirakan seluruh SDGs baru dapat tercapai di Asia Pasifik pada 2062 (32 tahun melampaui *deadline* tahun 2030).
5. Dengan upaya kuat, terlepas dari tantangan global, **capaian SDGs Indonesia sudah lebih tinggi dari rerata dunia**:
 - Dari 233 indikator SDGs yang tersedia datanya, 61.4% (143 indikator) telah mencapai target, sedangkan 12% lainnya 28 indikator) menunjukkan trend membaik (*on track*).
 - Termasuk dalam indikator yang *on track* tersebut adalah *No Poverty, Quality Education, Gender Equality* serta *Industry, Innovation and Infrastructure*.
 - Secara keseluruhan terdapat 76% indikator SDGs yang telah tercapai dan mengalami kemajuan menuju pencapaian yang lebih baik.
 - Masih terdapat 26.6% atau 62 indikator yang perkembangannya masih memerlukan perhatian khusus.
 - Dalam Sesi ke-79 UNGA Tahun 2024, Indonesia juga turut menyepakati *Pact of the Future* yang menekankan basis penguatan multilateralisme pada generasi muda, teknologi dan SDGs – ketiga elemen dimana Indonesia dapat memainkan peran kepemimpinan di panggung global.

Posisi Pemerintah RI

6. Guna mencapai target SDGs, Pemerintah RI melakukan berbagai langkah akselerasi, yaitu:
 - a. **Menyelaraskan SDGs ke dalam berbagai kebijakan, peraturan dan program nasional dan daerah**, termasuk ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (*RPJMN*).
 - b. **Melokalkan SDGs** dari tingkat nasional hingga ke tingkat desa.
 - Sampai dengan September 2022, terdapat 31 provinsi yang telah menetapkan Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB/SDGs melalui Peraturan Gubernur.
 - Pemerintah Daerah provinsi juga berkewajiban untuk menyusun laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan SDGs.
 - Peningkatan kapasitas serta dukungan bagi daerah dilakukan secara berkesinambungan
 - c. **Penguatan kemitraan multipihak** (*multistakeholders partnership*) dalam pencapaian SDGs, melalui penguatan kolaborasi antara Pemerintah dengan Organisasi Masyarakat Sipil, Akademisi, Pelaku Usaha, Media dan Filantropi.
 - d. **Memobilisasi pendanaan pembangunan**, termasuk melalui mekanisme pendanaan inovatif, seperti *blended finance*, *SDGs bonds and sukuk*.
 - e. **Pengembangan SDGs Center** di berbagai perguruan tinggi di Indonesia yang dapat memfasilitasi policy research dan peningkatan kapasitas dan inovasi.
7. Beberapa pencapaian Indonesia dalam implementasi SDGs secara Global dan nasional antara lain:
 - a. Pengurangan Kemiskinan: sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin pada Maret 2024 sebesar 9,03%, menurun 0,33 persen poin terhadap Maret 2023 dan menurun 0,54 persen poin terhadap September 2022;
 - b. Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan: Angka partisipasi kasar (APK) pendidikan dasar mencapai 98,4% pada 2022 dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mencakup lebih dari 250 juta penduduk pada 2023, serta program imunisasi dasar lengkap meningkat hingga 84% pada 2022;
 - c. Energi Terbarukan: Kapasitas pembangkit EBT meningkat menjadi 12,5 GW pada 2023, tapi hal ini masih bisa diakselerasi lebih lanjut karena masih jauh dari target baruan energi.

B. Isu SDGs Financing

Latar Belakang dan Perkembangan

1. Kesenjangan pendanaan SDGs masih menjadi tantangan bagi negara berkembang, termasuk Indonesia.
 - Kebutuhan pendanaan SDGs Indonesia hingga 2030 diperkirakan mencapai Rp 122.000 triliun, dengan kesenjangan pendanaan sebesar Rp 24.000 triliun.
2. Kesenjangan pendanaan SDGs umumnya disebabkan berbagai faktor, yaitu:
 - a. **Masih minimnya peran sektor swasta dalam pendanaan SDGs**
 - Sektor swasta berpotensi besar untuk mendukung pendanaan SDG melalui investasi berbasis keberlanjutan (ESG-focused investment), inovasi, dan

- pengelolaan sumber daya, namun di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, peran financing SDG dari swasta masih tergolong minim.
- Banyak perusahaan di negara berkembang belum memahami bagaimana SDGs relevan dengan model bisnis yang tersedia, dimana SDGs diposisikan *interchangeable* dengan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), bukan sebagai peluang bisnis strategis.
- b. **Perlunya penguatan insentif untuk pembangunan berkelanjutan**
- Pemerintah perlu memperhatikan kebijakan yang mendukung pembangunan berkelanjutan seperti insentif pajak untuk green investment atau prosedur penerbitan obligasi hijau (green bonds).
 - Di Indonesia, insentif fiskal dan non-fiskal untuk sektor swasta yang berkontribusi pada SDGs masih perlu diperkuat sehingga menarik keterlibatan pelaku usaha.
- c. **Korelasi sektor informal dalam capaian SDGs**
- Sektor informal, yang mendominasi perekonomian di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia sering kali belum terhubung dengan agenda keberlanjutan SDGs.
- d. **Keterbatasan fleksibilitas kebijakan fiskal**
- Pendanaan proyek-proyek SDGs terkadang menggunakan hutang negara sehingga berpotensi membatasi fleksibilitas kebijakan fiskal dalam jangka panjang.
3. Berdasarkan OECD (2020), pandemi Covid-19 telah membuat kesenjangan pembiayaan global untuk mencapai SDGs diproyeksikan meningkat dari USD 2,5 triliun menjadi USD 4,2 triliun. Hal yang sama juga berlaku di Indonesia.
- Ⓟ Sebelum pandemi, kesenjangan pembiayaan Indonesia untuk mencapai SDGs pada 2030 diperkirakan mencapai USD 1 triliun. Kebutuhan untuk lima tahun ke depan menuju 2030 diperkirakan lebih besar.

Posisi Pemerintah Indonesia

4. Strategi Indonesia untuk pendanaan SDGs, dikenal sebagai “Tiga Mesin Ekonomi”, yang mencakup revitalisasi ekonomi konvensional, pengembangan mesin ekonomi baru, serta penguatan ekonomi Pancasila.
- a. Secara khusus, dalam memenuhi kebutuhan pendanaan pembangunan, Indonesia menggunakan berbagai instrumen pendanaan inovatif, seperti *blended finance*, obligasi berkelanjutan (*green bonds* dan *blue bonds*), *SDG bonds*, serta *Islamic finance* (zakat untuk SDGs).
- b. Salah satu solusi pendanaan inovatif Indonesia pasca pandemi adalah penerbitan *SDG Bond* yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022. Instrumen keuangan ini dirancang untuk membiayai proyek-proyek yang berdampak langsung pada sektor-sektor penting seperti kesehatan, pendidikan, dan akses telekomunikasi.
5. Kolaborasi Pemerintah dan Non-Pemerintah dalam mendukung SDGs dapat dilakukan melalui pembiayaan atau pendanaan yang berkelanjutan. Upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam rangka penguatan kolaborasi dan inovasi sesuai dengan Perpres No. 11

Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di antaranya:

- (i) pemutakhiran SDGs, peta jalan SDGs, dan rencana aksi nasional SDGs;
- (ii) mendorong peran serta para pihak (Pemerintah dan Pemda, pelaku usaha, filantropi, akademisi dan ormas);
- (iii) menguatkan peran gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat; dan (iv) mendorong platform pembiayaan inovatif untuk SDGs.

C. Upaya Mobilisasi Komitmen Politik untuk Pencapaian SDGs

Latar Belakang

1. Komitmen politik yang kuat menjadi elemen kunci dalam memastikan implementasi SDGs secara konsisten di tingkat nasional dan daerah.

Posisi Pemerintah Indonesia

2. Sejak tahun 2017, Pemerintah Indonesia telah berkomitmen melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia No.59 Tahun 2017 untuk mendukung upaya global dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / SDGs bersama PBB.
 - Ⓔ Peraturan Presiden No. 111 Tahun 2022 sebagai dasar hukum implementasi SDGs di Indonesia, strategi pendanaan inovatif seperti *SDG Bonds*, serta amanat penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs).
3. Dalam melaksanakan SDGs, Pemerintah Indonesia menjalankan prinsip partisipasi yang **inklusif (*leave no one behind*) dengan melibatkan 4 platform partisipasi** yang terdiri atas: (1) Pemerintah dan Parlemen; (2) Akademisi dan Pakar; (3) Filantropi dan Pelaku Usaha; serta (4) Organisasi Masyarakat Sipil dan Media.
4. Sebagai artikulasi komitmen politik di tingkat nasional, Indonesia telah mengintegrasikan SDGs ke dalam kebijakan domestik, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan menjadikan indikator SDGs sebagai acuan dalam pengambilan keputusan kebijakan di semua level pemerintahan.
 - Langkah ini kemudian dilanjutkan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang tetap mengutamakan keselarasan dengan SDGs dalam RPJMN 2025-2029 guna mendukung Visi Indonesia Emas 2045.
5. Penyelarasan kebijakan nasional dengan diplomasi akan memainkan peran penting dalam membangun komitmen politik yang lebih luas untuk pencapaian target SDGs dimaksud, melalui berbagai pendekatan yang relevan, termasuk:
 - a. Diplomasi Pembangunan: menggalang kerja sama internasional untuk akselerasi SDGs Indonesia, misalnya dalam hal transfer teknologi, atau investasi transisi energi.
 - b. Diplomasi Ekonomi: mendorong kemitraan strategis dengan negara-negara maju dan organisasi internasional untuk pembiayaan SDGs, mengoptimalkan perjanjian perdagangan dan investasi yang mendukung pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan.
 - c. Diplomasi Sosial dan Kemanusiaan: berperan aktif dalam penyelesaian isu kemiskinan global, pengungsi, dan krisis kemanusiaan lainnya melalui program bantuan internasional.

- d. Diplomasi Teknologi dan Pendidikan: memperluas kerjasama penelitian dan inovasi dengan negara lain untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan akses teknologi, meningkatkan beasiswa dan pertukaran pelajar untuk mengurangi kesenjangan sumber daya manusia.

D. Peran Parlemen dalam *Scaling Up* Aksi Pencapaian SDGs

1. Parlemen sebagai lembaga legislatif memiliki kewenangan dan kapasitas untuk mengawal Pemerintah dalam memenuhi target SDGs. Parlemen dapat berperan mengawal pemenuhan komitmen dengan mengoptimalkan fungsi-fungsi, ruang-ruang koordinasi, dan sumber daya yang tersedia.
2. Pada **aspek regulasi**, Parlemen dapat mendorong dan memastikan terjadinya sinkronisasi dan harmonisasi berbagai undang-undang sektoral terkait pencapaian tujuan berkelanjutan, misalnya pada sektor pangan, pendidikan, kesetaraan gender maupun penanganan perubahan iklim.
3. Pada **aspek pendanaan**, perlu diperhatikan bahwa kesenjangan antara kebutuhan pembiayaan SDGs dengan ketersediaan dana publik masih sangat besar.
4. Pada **aspek transparansi dan akuntabilitas**, Parlemen dapat menjaga prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam melaksanakan berbagai kebijakan dan anggaran melalui pengembangan sistem informasi pendanaan SDGs yang terintegrasi.
5. Parlemen juga memiliki kapasitas untuk mengembangkan pusat data dan informasi terkait SDGs, seperti inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan regulasi terkait upaya pencapaian SDGs pada berbagai tingkat peraturan, hingga peraturan-peraturan teknis di tingkat daerah.

E. Women, Peace, and Security (WPS)

Latar Belakang dan Perkembangan

1. WPS adalah salah satu isu yang memperoleh perhatian khusus oleh berbagai negara, bahkan kerap diangkat pada tingkat multilateral di dalam kerangka kerja sama PBB seperti Dewan Keamanan, Majelis Umum Komite III, dan Dewan HAM.
2. Resolusi DK PBB 1325 (2000) merupakan Resolusi DK PBB utama untuk isu *Women, Peace and Security* (WPS).
 - Ⓟ Resolusi ini merupakan Resolusi DK PBB pertama yang mengangkat mengenai dampak konflik bersenjata terhadap perempuan serta pentingnya peran perempuan yang sejajar dan penuh sebagai agen perdamaian dan keamanan, termasuk dalam pencegahan konflik, *peacekeeping*, resolusi konflik, dan *peace building*.
3. Pada 28 Agustus 2020 DK PBB telah mengesahkan Resolusi 2538 (2020) mengenai *Women in Peacekeeping Operations* yang merupakan inisiatif Indonesia.
 - Ⓟ Resolusi mendapatkan dukungan dari 97 negara anggota PBB.
 - Ⓟ Resolusi mendorong upaya untuk terus meningkatkan partisipasi dan peran personel perempuan dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian (MPP) PBB serta memastikan penyediaan fasilitas dan sarana yang diperlukan *peacekeepers* perempuan.
4. Sejalan dengan Resolusi 2538, Indonesia berkomitmen meningkatkan partisipasi *peacekeepers* perempuan, termasuk peningkatan kapasitasnya. Dalam hal ini, baik TNI maupun Polri telah menyelenggarakan pelatihan bagi *peacekeepers* perempuan yang akan ditugaskan ke Misi Pemeliharaan Perdamaian (MPP).
 - Ⓟ Perempuan memiliki peran signifikan dalam menciptakan perdamaian yang berkelanjutan (*sustainable peace*) melalui peran mereka dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya. Indonesia senantiasa mendukung peran penting perempuan sebagai 'agen perdamaian' dan 'agen perubahan', sejalan dengan komitmen dalam Resolusi DK PBB 1325.
 - Ⓟ Pada 7 Agustus 2024, DK PBB mengadakan briefing dengan tema *Sustaining WPS Commitment in the Context of Accelerated Drawdown of Peace Operation* yang membahas dampak tren *drawdown* dan ditutupnya beberapa MPP PBB terhadap komitmen WPS.
 - Ⓟ Direktur Eksekutif *UN Women* menyampaikan bahwa meskipun konflik meningkat, anggaran WPS justru dipotong oleh beberapa negara.
 - Ⓟ Penurunan jumlah personel MPP PBB dari 121.000 pada 2016 menjadi 71.000 pada 2024, memperparah situasi kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan, terutama di negara-negara seperti Haiti dan Mali.
 - Ⓟ Terdapat penekanan perlunya pendanaan yang memadai, integrasi perspektif gender ke dalam semua komponen MPP PBB, keterlibatan perempuan dalam proses perdamaian, serta tindakan lebih lanjut dari DK PBB untuk melindungi kesetaraan gender di masa transisi.

Posisi Pemerintah Indonesia

5. Indonesia secara konsisten memiliki komitmen yang kuat dalam pengarusutamaan gender di seluruh bidang pembangunan, baik tingkat nasional, kawasan, maupun global.
6. Pemerintah RI memiliki komitmen pada isu WPS. Indonesia akan terus berupaya untuk berpartisipasi pada tingkatan nasional maupun internasional secara linier dalam meningkatkan upaya-upaya pencegahan konflik dan perdamaian internasional yang saat ini bersifat *cross-cutting* dan multidimensional.
7. Pemerintah RI berpandangan bahwa penyertaan perempuan dan anak merupakan bagian integral dari pemberdayaan komunitas yang berkontribusi pada penguatan ketahanan lokal dan pembentukan platform pembangunan yang efektif.
8. Indonesia terus mendukung implementasi Resolusi 1325. Pada peringatan 20 tahun Resolusi 1325 di DK PBB, Indonesia selaku salah satu negara anggota DK telah menyampaikan pernyataan dengan pokok sebagai berikut:
 - a. Pentingnya peningkatan partisipasi perempuan dalam isu perdamaian dan keamanan, termasuk sebagai negosiator dan mediator;
 - b. Peran *peacekeepers* perempuan harus terus diperkuat;
 - c. Pendekatan *multi-stakeholders* penting untuk memastikan partisipasi perempuan dalam upaya *sustaining peace*.
9. Beberapa peran aktif Indonesia dalam isu WPS antara lain:
 - a. Menjadi *co-sponsor* pertemuan *Upholding Women's Rights in Afghanistan: An Urgent Moment for UNAMA Renewal* diselenggarakan oleh *Group of Friends (GoF) Women in Afghanistan*, bekerja sama dengan *UN Women*, dan *Georgetown Institute for Women, Peace and Security*, pada tanggal 15 Maret 2022.
 - b. Memprakarsai pembentukan *Southeast Asian Network of Women Peace Negotiators and Mediators* (SEANWPNM) untuk memajukan agenda WPS di Asia Tenggara pada 2019. Pada 14 Juni 2021, Indonesia menyelenggarakan *Regional Forum of Women Peace Negotiators and Mediators* yang menghadirkan perempuan mumpuni dan berpengalaman dalam resolusi konflik dan bina damai.
 - c. Di sela-sela *78th UNGA High Level Week*, Indonesia bersama dengan Kanada menjadi *co-host* kegiatan "*High Level Event on Global Solidarity for Afghan Women and Girls*".
 - d. Menlu RI hadir pada *Side Event Commemorating The 50th Anniversary of Asean-Japan Friendship and Cooperation "Why Do We Need Women's Perspectives?" Female Foreign Ministers of Japan And Indonesia Talk* di Jepang pada 16 Desember 2023.
10. Pada tingkat nasional, Pemerintah Indonesia telah menerapkan sejumlah kebijakan terkait reformasi berbasis gender terhadap institusi keamanan, sebagai berikut:
 - a. Perencanaan dan anggaran yang responsif terhadap gender.
 - b. Kurikulum terkait pengedepanan dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan telah diintegrasikan ke seluruh tingkatan pendidikan aparat penegak hukum di Indonesia.
 - c. Pengedepanan '*gender responsive training and capacity building*' bagi aparat penegak hukum terkait di lapangan yang menangani secara langsung isu kekerasan terhadap perempuan.

- d. Indonesia memiliki *blueprint* terkait reformasi lapas yang diantaranya bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas dalam mendukung hak dan kesehatan reproduksi narapidana perempuan.
 - e. Disusunnya kerangka kebijakan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan penghormatan terhadap hak-hak perempuan dan percepatan integrasi kesetaraan gender di dalam pembangunan nasional, seperti: 1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024 yang memposisikan pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender sebagai indikator dalam Agenda Pembangunan; serta 2) Rencana Aksi HAM (RAN HAM) 2021 – 2025 yang menempatkan perempuan sebagai kelompok sasaran prioritas pembangunan nasional.
11. Dalam rumusan Asta Cita dan program prioritas yang menjadi turunannya, terdapat beberapa target yang terkait dengan pemenuhan dan pemajuan hak perempuan, di antaranya: Poin 5 (Pemberantasan kemiskinan), Poin 9 (Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif), dan Poin 10 (Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas).

F. Isu Keamanan Internasional Mengemuka

I. Isu Palestina

Latar Belakang dan Perkembangan

1. Sejak 7 Oktober 2023 hingga saat ini, Israel masih terus melakukan serangan ke Gaza:
 - Ⓢ Per Januari 2025, korban tewas warga Palestina sudah melampaui 46.000 orang. Di pihak Israel, korban tewas mencapai lebih dari 1.706 jiwa.
2. Perundingan Doha yang diselenggarakan pada 27 Oktober 2024, yang melibatkan mediator Qatar dan AS, untuk mencari terobosan bagi kebuntuan untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata Hamas-Israel di Gaza, belum memperoleh titik terang. Ganjalan utama kesepakatan masih sama yaitu bersikerasnya posisi Hamas dan Israel terkait gencatan senjata permanen dan penarikan pasukan Israel di Gaza
3. Pada 28 Oktober 2024, Knesset (Parlemen) Israel telah mengesahkan 2 RUU yang bertujuan untuk (*entry into force tahun 2025*):
 - Ⓢ Melarang seluruh aktivitas UNRWA di wilayah yang dikontrol Israel (Tepi Barat/Yerusalem Timur).
 - Dampak: UNRWA tidak lagi bisa memberikan bantuan kemanusiaan di wilayah tersebut, dan secara politik menyatakan bahwa Tepi Barat dan Yerusalem Timur merupakan bagian dari Israel.
 - Ⓢ Melarang kontak antara pemerintah Israel dengan UNRWA.
 - Dampak: staf UNRWA dapat dipersekusi, diakhirinya berbagai kewajiban fasilitasi Israel termasuk penerbitan visa, dan potensi ditutupnya 5 (lima) area operasi UNRWA (tidak hanya di Gaza dan Tepi Barat).
4. Pada 19 Juli 2024 Mahkamah Internasional telah mengeluarkan putusan *Advisory Opinion* yang menyatakan bahwa pendudukan Israel atas Palestina adalah ilegal dan harus diakhiri.

5. DK PBB telah mengadopsi 4 (empat) resolusi terkait situasi di Gaza.
 - a. 15 November 2023 – Resolusi 2712 (2023) mengenai “*urgent and extended humanitarian pauses and corridors throughout the Gaza strip*” .
 - Namun, Israel secara terbuka menyatakan akan terus melakukan agresi sampai Hamas dihancurkan dan para sandera dikembalikan.
 - b. 22 Desember 2023 – Resolusi DK 2720 (2023) yang menggarisbawahi kewajiban state parties berdasarkan hukum humaniter internasional untuk memastikan pengiriman bantuan kemanusiaan secara segera, aman, dan tak terganggu kepada masyarakat sipil Palestina di Gaza.
 - Resolusi ini disetujui 13 negara anggota DK PBB, sementara Inggris dan Amerika Serikat abstain.
 - c. 25 Maret 2024 – Resolusi 2728 (2024) yang menuntut gencatan senjata segera selama bulan Ramadhan sebagai langkah awal menuju gencatan senjata permanen dan mendorong pelepasan tahanan serta akses bantuan kemanusiaan.
 - Resolusi merupakan inisiatif Mozambique dan tidak menyebut gencatan senjata permanen agar dapat diadopsi. Empat belas anggota DK mendukung dan AS abstain.
 - d. 10 Juni 2024 – Resolusi 2735 (2024) yang mendukung *ceasefire* plan Amerika Serikat,
 - Resolusi diusulkan oleh Amerika Serikat dan didukung oleh seluruh negara anggota DK PBB kecuali Rusia (abstain).
6. DK PBB sendiri gagal mengadopsi 8 (delapan) resolusi terkait situasi di Gaza karena veto, termasuk Ranres terkait *humanitarian ceasefire*, akses bagi bantuan kemanusiaan, dan pengutukan segala bentuk kekerasan dan terorisme. Ranres gagal dibahas karena kurang mendapat cukup suara.
7. Pada 19 Desember 2024, Resolusi Majelis Umum PBB yang meminta *advisory opinion* (AO) *Internasional Court of Justice* (ICJ) mengenai kewajiban bantuan kemanusiaan Israel untuk Palestina dan memaksa Israel untuk mematuhi hukum internasional diadopsi.
 - Ⓟ Sebagai catatan, 137 negara mendukung (termasuk Indonesia), 12 negara menolak, dan 22 negara abstain.
8. Pada 28 Oktober 2024, DK PBB telah menyelenggarakan *Urgent Briefing* terkait situasi di Timur Tengah dengan pokok:
 - Ⓟ *Assistant Secretary General for Middle East, Asia and Pacific* mendesak Iran dan Israel untuk menghentikan semua tindakan eskalasi.
 - Ⓟ AS sampaikan bahwa serangan Israel terhadap Iran pada 26 Oktober 2024 merupakan upaya bela diri dan AS tidak berpartisipasi dalam serangan militer tersebut, namun akan selalu membantu memastikan keamanan rakyat dan wilayah Israel dari Iran dan proxies- nya.
 - Ⓟ Iran menyampaikan bahwa agresi Israel terhadap Iran merupakan pelanggaran jelas terhadap kedaulatan dan integritas teritorial serta Hukum Internasional dan Piagam PBB serta pelanggaran tersebut menunjukkan imunitas yang dimiliki Israel.
 - Ⓟ Israel turut hadir dan mendorong DK untuk menerapkan sanksi yang menargetkan infrastruktur militer dan ekonomi Iran, menetapkan Korps Garda Revolusi Islam sebagai ‘teroris’ dan mengisolasi Iran secara diplomatis.

9. Pada 29 – 30 Oktober 2024, DK PBB telah menyelenggarakan pertemuan *Quarterly Open Debate on Middle East, including the Palestinian Question*.
 - Ⓢ Pertemuan berhasil menyepakati *Press Statement* yang pada intinya menyampaikan keprihatinan atas adopsi UU Knesset yang menghentikan operasi UNRWA di wilayah OPT serta mendesak pemerintah Israel untuk menghormati kewajiban internasionalnya, menghormati hak istimewa dan kekebalan UNRWA dan memfasilitasi distribusi bantuan kemanusiaan.
 - Ⓢ Indonesia turut menyampaikan *statement* mengecam serangan Israel secara terus menerus terhadap PBB, termasuk terkait UU Knesset dan serangan terhadap UNIFIL, seruan bagi *immediate and permanent ceasefire* di Gaza, dan mengamankan *two-state solution*.
10. Pada tanggal 9 Desember 2024, Sekjen PBB mengeluarkan surat *appeal* kepada MU dan DK PBB untuk memastikan agar 2 (dua) UU Knesset Israel yang melarang UNRWA dan mencabut hak dan keistimewaan UNRWA sebagai entitas PBB, tidak diberlakukan.
11. Pada tanggal 19 Desember 2024, MU PBB telah mengadopsi Resolusi bertajuk *“Request for an Advisory Opinion of the International Court of Justice on the Obligations of Israel in Relation to the Presence and Activities of the United Nations, Other International Regulations and Third States”*.
 - Ⓢ Intinya menyampaikan bahwa tidak ada negara yang dapat menghalangi penyediaan bantuan kemanusiaan kepada warga sipil di wilayah konflik; tindakan yang dilakukan Israel melanggar hukum internasional dan tidak dapat ditoleransi; menyuarakan *concern* legislasi Knesset Israel yang menyerang UNRWA sebagai institusi PBB.
12. Pada tanggal 3 Januari 2025, DK PBB telah menyelenggarakan *briefing* guna membahas serangan terhadap rumah sakit dan fasilitas medis lainnya di Gaza.
13. Di hari yang sama (03/01/25), Presiden MU PBB ke-97 telah mensirkulasikan surat dari Sekjen PBB yang menyampaikan laporan implementasi dari sejumlah provinsi yang tercantum pada Resolusi ESS-10/26 mengenai dorongan gencatan senjata di Gaza.

Posisi Pemerintah Indonesia

14. Palestina selalu menjadi isu prioritas dalam politik luar negeri Indonesia. Indonesia selalu menegaskan posisinya di berbagai forum internasional bahwa Palestina adalah negara berdaulat, sesuai dengan prinsip solusi dua negara.
15. Indonesia terus memperjuangkan dukungan terhadap Palestina, dengan tujuan utama (i) gencatan senjata permanen dan segera (ii) masuknya bantuan kemanusiaan tanpa hambatan (iii) pengakuan negara palestina dan keanggotaan Palestina di PBB sebagai untuk mendukung pencapaian *two state solution*.
 - Ⓢ Menyuarakan seruan untuk segera lakukan *ceasefire* dan memastikan akses bagi bantuan kemanusiaan di berbagai forum PBB (DK, Komite I, II, III, VI, SMU PBB 78, Biro CEIRPP) serta dalam pertemuan OKI dan GNB.
 - Ⓢ Memberikan dukungan (baik *written statement* maupun *oral statement*) dalam proses AO Mahkamah Internasional yang menyatakan bahwa pendudukan Israel atas Palestina adalah ilegal dan harus diakhiri.
16. Menlu RI telah melakukan serangkaian diplomasi mendukung Palestina, a.l.:

- a. Menghadiri Pertemuan Luar Biasa Menlu negara anggota D-8 di Istanbul pada 8 Juni 2024, guna bahas situasi di Gaza.
 - b. Dalam berbagai kesempatan pertemuan bilateral, seperti kunjungan kerja ke Brussel, Luksemburg Oslo dan Helsinki pada Juni 2024, Menlu mengangkat isu Palestina dan mendorong negara-negara untuk mengakui Palestina dan mendukung Palestina menjadi anggota penuh PBB.
 - c. Mengangkat isu Palestina di Pertemuan AMM PMC di Laos akhir Juli lalu dan dan mendorong negara-negara untuk mengakui Palestina dan mendukung Palestina menjadi anggota penuh PBB.
 - d. *Indonesia Africa Forum*, khususnya di IAPF, *Indonesia Africa Parliamentary Forum*.
 - e. Mengangkat isu Palestina di *High Level Week* Majelis Umum PBB ke-79.
17. Indonesia telah mengirimkan berbagai bantuan kemanusiaan ke Gaza dengan keterangan sebagai berikut:
- a. 90,41 ton bantuan kemanusiaan pada November 2023 yang terdiri dari kebutuhan dasar, medis, dan sanitasi;
 - b. 242,6 ton bantuan pada 18 Januari 2024;
 - c. 900 parasut yang digunakan dalam operasi airdrop bantuan kemanusiaan ke Gaza pada Maret 2024;
 - d. bantuan finansial senilai 1 juta Dolar AS untuk mendukung pengobatan korban konflik Palestina yang dirawat di sejumlah rumah sakit di Mesir;
 - e. Pada 9 Agustus 2024 dan 6 September 2024, Indonesia telah mengirimkan 35 tenaga kesehatan TNI untuk mendukung misi kesehatan UAE di Kapal Roro UAE yang diubah menjadi RS terapung sementara di El-Arish.
18. Mulai tahun 2023, Indonesia telah meningkatkan kontribusi rutin pada UNRWA, yang sebelumnya kontribusi per tahun sebesar USD 200.000. Sejak krisis Gaza Oktober 2023, Indonesia meningkatkan kontribusi menjadi USD 600.000. Mulai 2024, kontribusi tersebut kembali ditingkatkan menjadi sebesar USD 1.200.000.

II. Isu Rusia-Ukraina

Latar Belakang dan Perkembangan

1. Sejak Februari 2022, isu Ukraina telah dibahas di berbagai forum dan organisasi multilateral, termasuk forum-forum teknis dan non-politis.
2. *Joint Communique (JC)* yang dihasilkan *Summit on Peace in Ukraine* di Swiss menjadikan 10- point *Ukraine Peace Formula* dan “*peace proposals*” lain yang sejalan dengan hukum internasional” sebagai dasar dari berlangsungnya summit tersebut. JC menyatakan usahanya untuk kembangkan kerangka perwujudan perdamaian yang komprehensif, adil, dan berkelanjutan serta tegaskan komitmen untuk menghormati kedaulatan semua negara dan penyelesaian konflik secara damai tanpa mengancam integritas teritorial.
 - Ⓢ JC berisi 3 (tiga) visi bersama yang tekankan penolakan ancaman ataupun penggunaan senjata nuklir dalam perang Ukraina, keamanan dan kebebasan penyediaan produk pertanian Ukraina, dan pemulangan tawanan Ukraina.
 - Ⓢ Indonesia tidak bergabung dalam JC tersebut karena tidak sejalan dengan posisi Pemri dalam menghadapi isu Ukraina, yaitu melibatkan kedua belah pihak dan menghindari *finger-pointing*.

- Ⓟ Seluruh anggota BRICS, termasuk Brazil dan RRT, tidak suarakan dukungan terhadap JC dan minta keterlibatan semua pihak yang berkonflik dalam penyusunan kesepakatan serupa.
3. Pada 16 Oktober 2024, Presiden Ukraina telah mempresentasikan *Victory Plan* di depan Parlemen Ukraina. *Victory Plan* merupakan perpanjangan dari *10-point Peace Formula* yang lebih menekankan pada aspek *hard politics* seperti geopolitik, militer-keamanan, dan ekonomi.
 - Ⓟ *Victory Plan* dipandang sebagai upaya Ukraina untuk “memenangkan” perang secara cepat dan frontal atau “*win-lose solution*”.
 4. Di sela-sela *High Level Week* Sidang Majelis Umum PBB ke-79 (*79th UN General Assembly*) pada 27 September 2024, RRT dan Brazil menginisiasi dan memimpin pertemuan *Global South High-Level Meeting on Ukraine* yang turut dihadiri oleh Indonesia, 14 negara Global South lain, dan 3 negara Barat sebagai *observer*.
 5. Pertemuan menghasilkan *Joint Communique* (JC) yang didukung (*endorsed*) oleh Algeria, Afrika Selatan, Brazil, Bolivia, RRT, Mesir, Indonesia, Kazakhstan, Kenya, Kolombia, Meksiko, Turkiye, dan Zambia.
 - Ⓟ Bandung *Principles* menjadi salah satu rujukan dalam JC yang menekankan solusi damai atas konflik berdasarkan prinsip solidaritas dan kemitraan bersama.
 - Ⓟ JC juga menyampaikan pembentukan *Group of Friends ‘Friends for Peace’* pada tingkat Watap guna melanjutkan konsultasi pada berbagai tingkatan dengan seluruh pihak terkait.
 6. MU PBB telah menyelenggarakan 6 (enam) sesi *11th Emergency Special Session* (ESS) dari tahun 2022 hingga 2023 mengenai Ukraina dan telah mengesahkan 6 (enam) resolusi melalui pemungutan suara yaitu:
 - a. Resolusi agresi terhadap Ukraina (2 Maret 2022): didukung 141 negara (termasuk Indonesia di mana Indonesia sebagai salah satu co-sponsor) 5 menolak, 35 abstain.
 - b. Situasi kemanusiaan di Ukraina (24 Maret 2022): didukung 140 negara (Indonesia dukung tanpa co-sponsor), 5 menolak dan 38 abstain.
 - Ⓟ Indonesia sampaikan *explanation of vote* (EoV) yang berintikan mendukung resolusi karena perlunya tindakan untuk mengatasi situasi kemanusiaan, namun menyayangkan kurangnya konsultasi inklusif di antara negara-negara anggota, serta perlunya membangun trust.
 - c. Penangguhan keanggotaan Rusia di DHAM (7 April 2022): 93 negara mendukung, 24 negara menolak, 58 negara abstain (termasuk Indonesia).
 - d. Integritas teritorial Ukraina – Penolakan Referendum Kemerdekaan 4 (empat) wilayah di Ukraina (12 Oktober 2022): 143 negara mendukung (termasuk Indonesia), 5 negara menolak, 10 negara abstain.
 - e. Resolusi *Furtherance of remedy and reparation for aggression against Ukraine* (14 November 2022): didukung 94 negara; 13 menolak, dan 73 abstain (termasuk Indonesia).
 - Ⓟ Indonesia sampaikan EoV yang berintikan mendesak penghentian perang dan penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas teritorial, serta agar Resolusi MU PBB tidak menjadi *rubber stamp* untuk mekanisme yang berada di luar tanggung jawab dan sistem PBB.

- f. Resolusi *Principles underlying a comprehensive, just and lasting peace in Ukraine* (23 Februari 2023): didukung 141 negara (termasuk Indonesia), 7 menolak, dan 32 abstain.
- Ⓟ Meski mendukung, Indonesia menyampaikan EoV yang berintikan reminder bahwa tanggung jawab untuk menghentikan perang semestinya terletak pada para pihak yang bertikai, dan pentingnya resolusi menggambarkan situasi di lapangan secara faktual.

Posisi Indonesia

7. Prinsip dasar posisi Pemerintah Indonesia sebagai berikut:
- Mengedepankan pendekatan konstruktif serta menghindari saling tuduh (*finger pointing*), kecaman, dan upaya isolasi terhadap pihak manapun yang tidak akan berkontribusi positif terhadap situasi di lapangan.
 - Mendorong semua forum internasional agar dapat satu suara untuk menekan semua pihak hentikan perang dan memprioritaskan keselamatan rakyat sipil serta mendukung dialog damai.
 - Mendorong agar semua forum dan organisasi internasional tetap fokus pada mandatnya dan menghindari politisasi konflik Rusia-Ukraina serta bekerja sama mendukung upaya global untuk mitigasi dampak perang.
8. Adapun posisi Pemri dalam pemungutan suara draft resolusi/decisions di berbagai forum dan OI bersifat kasus-per-kasus, tidak *one size fits all*, dan dirumuskan secara hati-hati dan terukur.
- Ⓟ Pemerintah RI menolak pendekatan *“take it or leave it”*. Namun, Indonesia belum pernah menolak inisiatif Resolusi atau *Decision*, sebagai bentuk komitmen aktif dalam upaya solusi, menghentikan perang dan kekerasan dan *engage* terhadap semua pihak.

III. Konflik Lain yang Menjadi Perhatian

9. Isu keamanan internasional pada tahun 2025 akan berkaitan dengan kelanjutan dari isu yang telah berjalan pada tahun-tahun sebelumnya. Menurut *International Crisis Group* (ICG) telah mengidentifikasi 10 (sepuluh) konflik yang harus diperhatikan pada tahun 2025 yang dapat memperburuk situasi keamanan global, yaitu:
- Suriah:** Setelah rezim Bashar al-Assad yang berkuasa selama 54 tahun runtuh pada Desember 2024 akibat serangan Hayat Tahrir al-Sham (HTS), Suriah menghadapi tantangan besar dalam transisi menuju stabilitas. Ahmed al-Sharaa, pemimpin HTS, kini menguasai Damaskus dan kota-kota besar lainnya. Konflik eksternal, seperti serangan Israel terhadap fasilitas militer Suriah dan ketegangan antara Turki dan pasukan Kurdi (SDF) di timur laut, akan menambah kompleksitas situasi keamanan pada tahun 2025.
 - Sudan:** Perang di Sudan telah membuat sekitar 12 juta orang mengungsi serta menciptakan kelangkaan pangan yang kritis. Konflik ini diperparah oleh keterlibatan pihak asing seperti Uni Emirat Arab dan Mesir. Selain itu, ambisi dan perpecahan internal telah berpotensi memicu fragmentasi Sudan dan kembali akan memperburuk isu keamanan di negara tersebut dan keamanan internasional.
 - Iran – AS dan Israel:** Awal tahun 2024, serangan Israel terhadap Iran merusak sebagian besar kekuatan militer Iran. Konflik ini dinilai sudah mereda namun tidak menutup kemungkinan adanya eskalasi yang tidak terduga dari kedua belah pihak maupun AS.

- d. **Haiti:** Haiti terus menghadapi kekacauan internal setelah pembunuhan Presiden Jovenel Moïse pada 2021, memicu munculnya kelompok *gangster* yang menguasai sebagian besar negara. Upaya internasional, termasuk misi polisi yang dipimpin Kenya dan dukungan finansial dari AS, gagal mengatasi masalah tersebut dan membuat situasi terus memburuk. Diperkirakan pada tahun 2025, konflik ini masih belum dapat diselesaikan dan akan mengancam situasi keamanan.
- e. **Meksiko – AS:** Kekerasan yang melibatkan kelompok kriminal yang berlangsung di Meksiko sejak 2006 telah mengakibatkan setidaknya total setengah juta orang tewas. Meskipun pemerintah Meksiko telah menambah jumlah pasukan keamanan, angka kekerasan semakin meningkat. Diperkirakan hubungan Meksiko dan AS akan semakin memanas dengan terpilih kembalinya Trump sebagai Presiden AS. Pada tahun 2025, kedua masalah ini masih akan terus menjadi isu yang berpotensi mendorong ketegangan internasional.
- f. **Myanmar:** Sejak kudeta tahun 2021, perang sipil di Myanmar telah mengakibatkan lebih dari 3 juta orang mengungsi, disertai penurunan sistem kesehatan dan pendidikan, serta anjloknya mata uang Kyat. Mulai muncul kelompok pemberontak yang melancarkan serangan-serangan baru. Pemilu yang dijadwalkan pada 2025 terancam akan menimbulkan kekerasan lebih lanjut dan tidak menguntungkan bagi warga Myanmar.
- g. **Semenanjung Korea:** Tahun 2024, ketegangan di Semenanjung Korea dimulai dengan adanya perubahan kebijakan Korea Utara yang menyebut Korea Selatan sebagai musuh utama dan juga meratifikasi Pakta Pertahanan dengan Rusia. Uji coba misil Korea Utara dan ancaman terhadap perbatasan maritim dengan Korea Selatan juga meningkatkan tensi di Semenanjung tersebut. Situasi diperburuk dengan ketegangan politik di Seoul setelah upaya pemakzulan Presiden Yoon Suk-yeol. Pada tahun 2025 diperkirakan belum ada titik temu yang pasti dari konflik ini sehingga harus menjadi perhatian khususnya bagi isu keamanan internasional.
- h. **AS – RRT:** Pada November 2023, hubungan AS dan RRT dinilai mulai stabil pasca pertemuan antara Presiden Xi Jinping dan Presiden Joe Biden. Namun, setelah Presiden Trump terpilih kembali, persaingan kedua negara diperkirakan akan semakin memanas karena adanya beberapa pihak dalam Pemerintahan yang mendukung persaingan dengan RRT. Trump juga berjanji akan menaikkan tarif barang dari RRT. Apabila tensi semakin tinggi, dikhawatirkan akan berdampak buruk bagi isu keamanan internasional, khususnya negara-negara berkembang.
- i. **Israel - Palestina:** telah dipaparkan di atas.
- j. **Rusia – Ukraina:** telah dipaparkan di atas.

G. Peran Parlemen dalam Keamanan Internasional

1. Parlemen memiliki peran strategis dalam membentuk undang-undang yang mendukung upaya keamanan internasional. Melalui fungsi pengawasan, Parlemen memastikan kebijakan eksekutif selaras dengan hukum internasional dan prinsip perdamaian. Selain itu, parlemen berkontribusi dalam mengesahkan traktat internasional dan mendorong implementasinya di tingkat nasional. Peran ini menjaga keseimbangan antara kepentingan domestik dan tanggung jawab global suatu negara.
2. Meskipun Parlemen memiliki peran strategis, kapasitasnya sering kali terbatas oleh kurangnya sumber daya, isu kelembagaan, dan dominasi politik eksekutif. Kondisi ini mempengaruhi kemampuan Parlemen untuk menjalankan fungsi legislatif dan pengawasan secara efektif dalam isu keamanan internasional

3. Kurangnya mekanisme kerja sama yang kuat antar Parlemen di tingkat regional maupun internasional menjadi kendala dalam merespons ancaman keamanan internasional. Diplomasi antar Parlemen yang tidak terorganisir dengan baik memperlemah upaya bersama untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas internasional.
4. Isu-isu keamanan global seringkali melibatkan perbedaan interpretasi hukum internasional, dan Parlemen seringkali kesulitan untuk menyusun undang-undang yang sesuai dengan norma-norma internasional. Ketidakpastian ini dapat menghambat negara dalam menjalankan kewajiban internasional dan berkontribusi pada stabilitas global.
5. Beberapa rekomendasi untuk memperkuat peran Parlemen dalam isu keamanan internasional di antaranya adalah:
 - a. Peningkatan kerja sama dan koordinasi antara Parlemen di tingkat regional dan global melalui forum-forum antar Parlemen seperti Inter-Parliamentary Union (IPU) atau ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA).
 - b. Parlemen perlu memiliki peran yang lebih aktif dalam meratifikasi dan mengimplementasikan perjanjian internasional yang berkaitan dengan keamanan. Parlemen perlu berfokus pada menciptakan kebijakan yang dapat menyeimbangkan antara kepentingan nasional dan kewajiban internasional. Selain itu, dengan meningkatkan proses ratifikasi yang lebih transparan dan efisien, negara dapat lebih cepat mengambil tindakan untuk memenuhi kewajiban internasional terkait perdamaian dan keamanan.

Direktorat Sosial Budaya dan OI Negara Berkembang

21 Januari 2025



@bksapdpr



@bksapdpr



bksapdpr



bksapdpr



Produced by:

COMMITTEE FOR INTER-PARLIAMENTARY
COOPERATION
INDONESIAN HOUSE OF
REPRESENTATIVES
(BKSAP DPR RI)

Email: biro_ksap@dpr.go.id

Phone: (62-21) 5715813

ksap.dpr.go.id